



PELUANG INVESTASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 2017-2021

Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikan
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan
2017-2021

Sub Direktorat Investasi Ketenagalistrikan
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
TA. 2016

KATA PENGANTAR

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PT PLN (Persero) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara Nasional dalam jumlah cukup, dengan sistem penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, akrab lingkungan, kualitas tinggi, efisien, dan harga yang wajar dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional yang berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengembangan sektor ketenagalistrikan membutuhkan metode pengelolaan yang tepat dan juga memerlukan modal yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai negara yang dianugerahi sumber kekayaan melimpah, Indonesia mempunyai potensi yang besar menjadi tujuan investasi yang menarik bagi calon investor.

Para investor memerlukan kondisi sektor ketenagalistrikan dan potensi investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, Buku Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021 dianggap penting sebagai panduan awal bagi para calon investor untuk berusaha di sektor ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk data kebutuhan dan mekanisme investasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan tabel guna memudahkan investor.

Akhirnya, semoga Buku Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021 ini dapat memberikan informasi yang jelas bagi para calon investor dan menjadikan langkah awal dalam usaha pengembangan sektor ketenagalistrikan.

Jakarta, Desember 2016

Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.2.1 Undang-Undang.....	3
1.2.2 Peraturan Pemerintah (PP).....	4
1.3. Dukungan Kebijakan.....	6
1.3.1. Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik.....	6
1.3.2. Kebijakan Investasi Ketenagalistrikan.....	9
1.3.3. Kebijakan Perizinan.....	12
1.3.4. Kebijakan Penetapan Wilayah Usaha.....	13
1.3.5. Kebijakan Harga Jual Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik.....	15
1.3.6. Kebijakan Tarif Tenaga Listrik.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN KONDISI TENAGA LISTRIK NASIONAL.....	18
2.1. Kondisi Permintaan Tenaga Listrik.....	18
2.2. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik.....	20
2.3. Kondisi Penyaluran Tenaga Listrik.....	21
2.4. Rasio Elektrifikasi.....	22
2.5. Kondisi Pasokan Tenaga Listrik.....	22
2.6. Ketersediaan Sumber Energi Primer.....	23

BAB III	25
PELUANG INVESTASI KETENAGALISTRIKAN	25
3.1. Arah Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik.....	25
3.2. Proyek-Proyek Pembangkit Strategis	27
3.3. Realisasi dan Rencana Kebutuhan Investasi	32
BAB IV	34
MEKANISME INVESTASI	34
4.1. Kebijakan Investasi	34
4.2. Skema Partisipasi Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik.....	35
4.3. Mekanisme Partisipasi Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik.....	37
4.4. Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.....	43
4.5. Kewenangan dan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.....	44
4.6. Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (sesuai Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 dan Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2014)	45
4.7. Private Power Utility (PPU)	51
4.8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK)	52
4.9. Sewa Jaringan Tenaga Listrik	54
4.10. Pelayanan Investasi Prioritas	56
4.11. Insentif Fiskal dan Non Fiskal	58
4.12. Jaminan Pemerintah	60
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. PETA WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TAHUN 2016.....	14
GAMBAR 2.1. PERKEMBANGAN KONSUMSI TENAGA LISTRIK NASIONAL (TWH).....	18
GAMBAR 2.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI PER KAPITA	19
GAMBAR 2.3. PERKEMBANGAN KAPASITAS PEMBANGKIT TERPASANG (MW).....	20
GAMBAR 2.4. PERKEMBANGAN PANJANG JARINGAN TRANSMISI (KMS)	21
GAMBAR 2.5. PERKEMBANGAN REALISASI DAN RENCANA RASIO ELEKTRIFIKASI	22
GAMBAR 2.6. KONDISI SISTEM KELISTRIKAN NASIONAL	23
GAMBAR 3.1. PERKEMBANGAN REALISASI (2010-2016) DAN RENCANA INVESTASI(2017-2019).....	33
GAMBAR 4.1. PROSES PERIZINAN IPP	38
GAMBAR 4.2. PROSEDUR PENGADAAN IPP DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG.....	39
GAMBAR 4.3. PROSEDUR PENGADAAN IPP DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG.....	40
GAMBAR 4.4. PROSEDUR PENGADAAN IPP DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG.....	41
GAMBAR 4.5. TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KPBU	42
GAMBAR 4.6. SYARAT-SYARAT PERIZINAN IUPLS DAN IUPL.....	43
GAMBAR 4.7. PROSES PERIZINAN DI PTSP PUSAT	44
GAMBAR 4.8. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IUPLS	46
GAMBAR 4.9. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IUPL.....	48
GAMBAR 4.10. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IO	50
GAMBAR 4.11. TATA CARA PERMOHONAN IZIN OPERASI	51
GAMBAR 4.12. PROSEDUR PENETAPAN WILAYAH USAHA	52
GAMBAR 4.13. LOKASI 2.500 DESA YANG BELUM BERLISTRIK.....	53

GAMBAR 4.14. MEKANISME PENETAPAN WILAYAH USAHA YANG BERSUBSIDI	53
GAMBAR 4.15. MEKANISME UPTLSK DENGAN PENUGASAN PEMERINTAH.....	54
GAMBAR 4.16. CONTOH 1 SKEMA SEWA TRANSMISI	55
GAMBAR 4.17. CONTOH 2 SKEMA SEWA TRANSMISI	56
GAMBAR 4.18. PROSEDUR IZIN INVESTASI 3 JAM.....	57
GAMBAR 4.19. PROSEDUR KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Potensi Sumber Energi Primer	24
----------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan tenaga listrik sudah menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus menganut asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah ditetapkan bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik, kepada badan usaha milik negara diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Pada dasarnya pembangunan sektor ketenagalistrikan di Indonesia masih sangat tergantung pada upaya pemerintah dalam penyediaan aspek pendanaan. Berbagai kebijakan penting telah ditempuh oleh Pemerintah yang mencakup kebijakan yang secara langsung untuk merespon pelemahan kondisi perekonomian. Kebijakan pendanaan tersebut merupakan langkah lebih lanjut dari keputusan untuk melakukan investasi pembangunan. Sementara di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana pembangunan sektor ketenagalistrikan juga masih sangat terbatas, sehingga langkah pendanaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat sulit diharapkan. Bahkan pendanaan yang sedang dalam proses juga akan mengalami berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan upaya-upaya untuk mendapatkan dana pembangunan yang diharapkan, baik bersumber dari dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas infrastruktur penyediaan tenaga listrik dalam rangka memperluas aksesibilitas listrik ke masyarakat.

Kebijakan investasi ketenagalistrikan yang dikeluarkan pemerintah seyogyanya dapat memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak agar calon investor swasta dapat memperoleh kesempatan pertama untuk ikut berpartisipasi dan bersaing secara sehat dengan para kompetitornya. Semakin awal kelengkapan data investasi tersebut disosialisasikan kepada para calon investor untuk memberikan informasi yang simetris kepada semua pihak, maka kelayakan proyek atau penawaran investasi yang diperoleh dari calon investor akan menjadi lebih menarik.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1 Undang-Undang

Untuk mengatasi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, maka pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan. Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengingat bahwa pengembangan ketenagalistrikan merupakan bagian yang terpadu dari pembangunan nasional, sehingga perlu diusahakan secara serasi, selaras dan serempak berdasarkan tahapan pembangunan nasional.

Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (PIUPL) terdiri dari:

- ❖ Pemerintah dan pemda melalui BUMN dan BUMD melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
- ❖ Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

BUMN diberi prioritas pertama, dan untuk BUMD, Swasta, Koperasi dan Swadaya masyarakat diberikan kesempatan sebagai penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi untuk wilayah yang belum berlistrik. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut dilakukan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

1.2.2 Peraturan Pemerintah (PP)

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989. PP 14/2012, membedakan antara Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, yaitu:

- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi Jenis Usaha:
 1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 2. Transmisi Tenaga Listrik;
 3. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
 4. Penjualan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi:
 1. Pembangkitan tenaga listrik,
 2. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, atau
 3. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan Izin Operasi (IO) yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara.

PP Nomor 42 Tahun 2012 mengatur mengenai Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, adapun syarat pembelian tenaga listrik lintas negara yang harus dipenuhi adalah belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat, hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat, tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi, untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat, tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri, dan tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Jual beli tenaga listrik lintas negara oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dilakukan setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Dalam rangka menunjang pembangunan sektor ketenagalistrikan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012, terdapat kegiatan usaha jasa, yaitu:

1. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
2. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
5. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
6. Penelitian dan pengembangan;
7. Pendidikan dan pelatihan;
8. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
9. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
10. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
11. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

1.3. Dukungan Kebijakan

1.3.1. Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam penyediaan tenaga listrik tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian lebih untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di pulau-pulau terluar melalui implementasi nyata sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat akses listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Disamping itu, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha juga diberlakukan untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari pembangkit tenaga listrik yang dimilikinya dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau masyarakat, apabila wilayah tersebut belum terjangkau oleh Pemegang Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Pembelian tenaga listrik dari *excess power* dimungkinkan juga dilakukan oleh PIUPTL sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, mengurangi Biaya

Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik setempat atau memperbaiki bauran energi primer untuk pembangkit tenaga listrik.

Dalam rangka melakukan efisiensi penyediaan tenaga listrik, perencanaan lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik diupayakan sedekat mungkin dengan lokasi beban dengan tetap mempertimbangkan lokasi potensi sumber energi primer setempat. Dengan lokasi pembangkit yang dekat dengan beban, diharapkan dapat mengatasi kendala keterbatasan kapasitas dan keterlambatan penyelesaian pembangunan jaringan transmisi. Dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik dipilih jenis pembangkit yang memprioritaskan ketersediaan sumber energi primer setempat.

Pada kenyataannya ada keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit dekat dengan beban dan tidak tersedianya sumber energi primer setempat. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan pembelian tenaga listrik dari pemegang izin operasi melalui skema *excess power* dan dalam perencanaan pengembangan pembangkit menggunakan prinsip biaya terendah (*least cost*). Adapun untuk daerah terpencil dan wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar dapat dikembangkan sistem tenaga listrik skala kecil.

1.3.2. Kebijakan Investasi Ketenagalistrikan

Investasi cenderung tertarik pada bidang maupun negara yang secara nisbi memiliki risiko (*risk*) yang lebih rendah dan berpeluang memperoleh *return* yang tinggi. Investasi dengan *risk* yang tinggi umumnya berkaitan dengan peluang *return* yang tinggi pula. Atas dasar peluang *return*, dapat dihitung peluang keuntungan (*profit*). Untuk itu, kebijakan investasi dilakukan dengan cara menyempurnakan produk regulasi yang mendorong investasi, pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal, dan memanfaatkan semaksimal mungkin pendanaan yang bersumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri.

Upaya Pemerintah untuk memperkecil *risk* investasi sektor ketenagalistrikan dilakukan dengan cara memberikan jaminan kepastian hukum melalui penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin kegiatan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menghormati kontrak-kontrak yang telah disepakati bersama, dan penerapan *law enforcement*. Perbaikan fungsi regulasi dan birokrasi juga dilakukan dengan cara mempermudah prosedur perizinan, mempercepat waktu proses pengadaan, pemberian subsidi kepada PLN sebagai upaya untuk menjaga *cash flow* PLN, sehingga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan pihak lain, dan untuk mempercepat proses negosiasi dengan *Independent Power Producer*, perlu adanya pedoman/patokan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Dalam hal kepemilikan usaha dibidang ketenagalistrikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut:

1. Pembangkit Tenaga Listrik dengan kapasitas kurang dari 1 MW modal dalam negeri 100%;
2. Pembangkit Listrik Skala Kecil dengan kapasitas 1 MW sampai dengan 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 49%;
3. Pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas \leq 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 67%;
4. Pembangkit Listrik dengan kapasitas lebih dari 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 95 % (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi);
5. Transmisi Tenaga Listrik kepemilikan modal asing maksimal 95 % (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi);
6. Distribusi Tenaga Listrik kepemilikan modal asing maksimal 95 % (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi);
7. Konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%;
8. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%;
9. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tinggi kepemilikan modal asing maksimal 49%;
10. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah kepemilikan modal dalam negeri 100%;
11. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik kepemilikan modal asing maksimal 95%;

12. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi kepemilikan modal asing maksimal 49%;

13. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah kepemilikan modal dalam negeri 100%;

Pengaturan kepemilikan usaha di bidang ketenagalistrikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di sektor ketenagalistrikan dengan tetap mempertimbangkan peran serta pengusaha nasional.

Dalam hal pendanaan proyek-proyek penyediaan tenaga listrik, penggunaan dana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih dilakukan, dimana ditujukan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah ataupun melalui BUMN atau BUMD. Sumber pendanaan melalui pinjaman Pemerintah yang diteruskan ke BUMN atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* untuk memperoleh pinjaman investasi dengan bunga yang rendah, dimana mekanisme SLA sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian oleh Pemerintah atas besaran pinjaman yang diperbolehkan. Untuk pendanaan yang bersifat fleksibel, BUMN sendiri dapat secara langsung memperoleh pendanaan untuk investasinya melalui penerbitan obligasi, pinjaman langsung, ataupun *revenue*. Sumber pendanaan yang terakhir adalah dari swasta murni yang melaksanakan proyek-proyek *Independent Power Producer (IPP)* ataupun *Public Private Partnership (PPP)*. Proyek-proyek PPP itu sendiri terus mengalami transformasi dalam pelaksanaannya, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

1.3.3. Kebijakan Perizinan

Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Izin tersebut meliputi: pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik.

Perizinan usaha penyediaan tenaga listrik merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan. Kebijakan perizinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima dengan mengedepankan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Kemudahan perizinan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan investasi.

Untuk efisiensi proses perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, maka pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terpadu seperti halnya pendelegasian kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perizinan ketenagalistrikan telah didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, namun pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan tetap dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan sebagai upaya untuk percepatan proses perizinan. Penggunaan teknologi informasi sangat dimungkinkan untuk diaplikasikan di masa yang akan datang sebagai sarana untuk mempermudah proses perizinan.

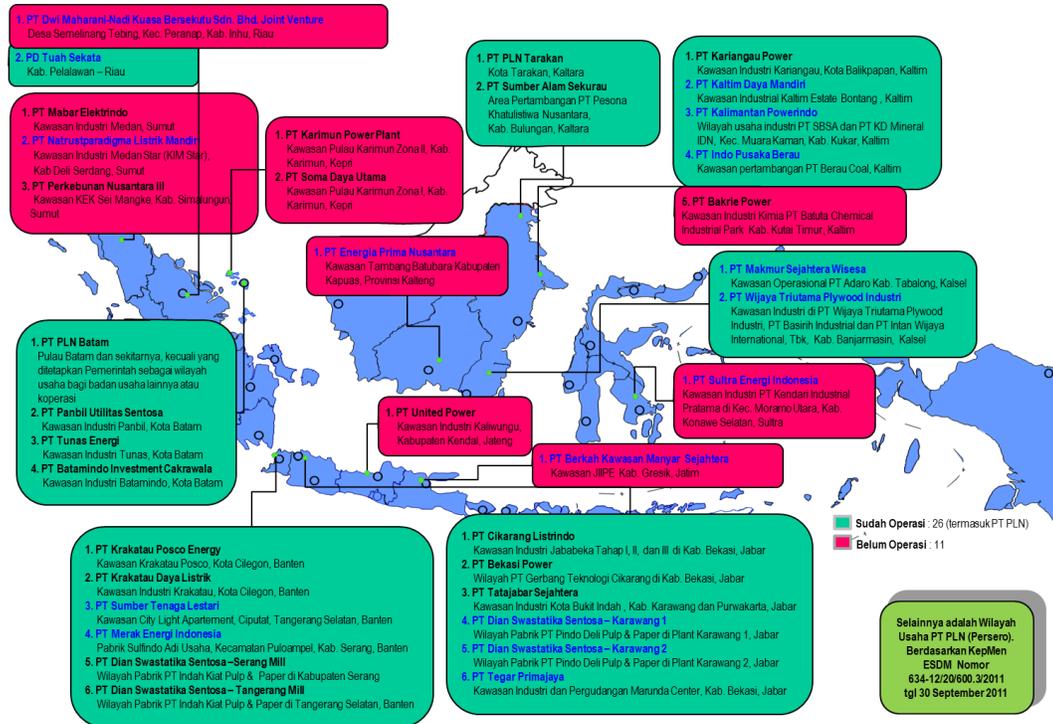
1.3.4. Kebijakan Penetapan Wilayah Usaha

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Disamping itu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik seperti halnya distribusi tenaga listrik di suatu kawasan, pusat perbelanjaan yang menjual listrik dan juga apartemen.

Penetapan wilayah usaha merupakan kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan untuk memperoleh wilayah usaha, badan usaha harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya, kecuali yang izinnnya diberikan oleh Menteri.

Guna menghindari tumpang tindih penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik antar badan usaha, kebijakan penetapan wilayah usaha oleh Pemerintah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Karena wilayah usaha penyediaan tenaga listrik bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, penetapan wilayah usaha memerlukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah sebagai pemberi rekomendasi. Dalam penerapannya, mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 jo. Nomor 07 Tahun 2016. Sampai dengan pertengahan November tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 25 wilayah usaha di luar wilayah usaha PT PLN

(Persero). Sebaran lokasi wilayah usaha tersebut adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2016 (status November 2016)

Pemegang wilayah usaha wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya. Kebijakan penetapan wilayah usaha juga dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan tenaga listrik secara nasional. Terkait hal ini dimungkinkan untuk melakukan kerjasama antar wilayah usaha dalam penyediaan tenaga listrik melalui penjualan kelebihan tenaga listrik dan juga pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik milik pemegang wilayah usaha lain. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik.

1.3.5. Kebijakan Harga Jual Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Kebijakan penetapan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik merupakan instrumen pengaturan untuk menjaga keseimbangan (*fairness*) para pihak yang bertransaksi. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Persetujuan harga jual tenaga listrik dapat berupa harga patokan. Untuk mendorong minat investor dan menjaga iklim usaha yang baik, pada prinsipnya harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

Untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik, Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan pengaturan harga jual tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, Mikro hidro, PLT Sampah, Angin dan EBT lainnya melalui mekanisme harga *Feed in Tariff* yang menarik dan juga harga patokan. Disamping itu, Pemerintah juga membuat pengaturan mekanisme harga jual untuk pembangkit besar dengan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur harga patokan pembelian tenaga listrik melalui penunjukan langsung dan pemilihan langsung.

Kebijakan penetapan harga sewa jaringan perlu diatur karena sifatnya yang monopoli alamiah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum, dan untuk usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dan/atau distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan

jaringan transmisi dan/atau distribusi setelah mendapat persetujuan harga atas sewa dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Adapun pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi tersebut harus memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi. Sebagai pedoman pelaksanaan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik.

1.3.6. Kebijakan Tarif Tenaga Listrik

Kebijakan Pemerintah mengenai tarif tenaga listrik adalah bahwa tarif tenaga listrik secara bertahap dan terencana diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga tarif tenaga listrik dapat menutup biaya pokok penyediaan yang dikeluarkan. Kebijakan ini diharapkan akan dapat memberikan sinyal positif bagi investor dalam berinvestasi di sektor ketenagalistrikan.

Penetapan kebijakan tarif tenaga listrik dilakukan sesuai nilai keekonomian, namun demikian tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Kepentingan dan kemampuan masyarakat;
3. Kaidah industri dan niaga yang sehat;
4. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
5. Efisiensi perusahaan;
6. Skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
7. Tersedianya sumber dana untuk investasi.

Kebijakan tarif tenaga listrik regional akan terus dikaji dan dimungkinkan untuk diberlakukan di masa mendatang, hal ini berkaitan dengan perbedaan

perkembangan pembangunan ketenagalistrikan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penerapan tarif tenaga listrik regional dapat mendorong kemandirian wilayah setempat dalam menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penerapan tarif tenaga listrik regional antara lain:

1. Kemampuan masyarakat atau pelanggan listrik di wilayah setempat;
2. Kondisi geografis sistem kelistrikan;
3. Kesiapan PLN dan pemegang saham PLN untuk memisahkan wilayah usahanya menjadi institusi atau anak perusahaan yang mandiri;
4. Kesiapan atau dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan dana subsidi listrik;
5. Tingkat kewajaran tarif tenaga listrik berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

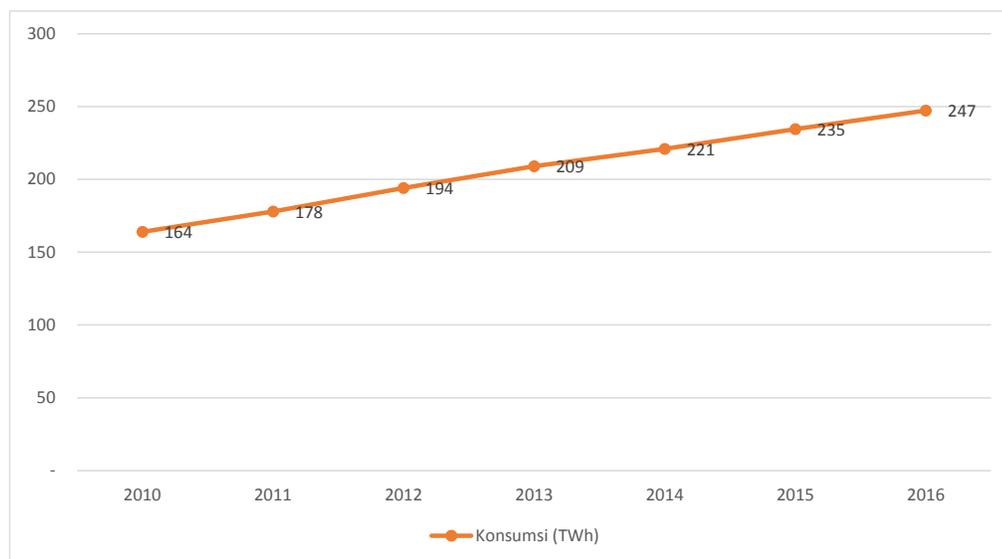
Kebijakan tarif tenaga listrik ke depan untuk golongan pelanggan yang tarifnya telah mencapai nilai keekonomian diarahkan pada penerapan “*Auto Tariff Adjustment*”.

BAB II

TINJAUAN KONDISI TENAGA LISTRIK NASIONAL

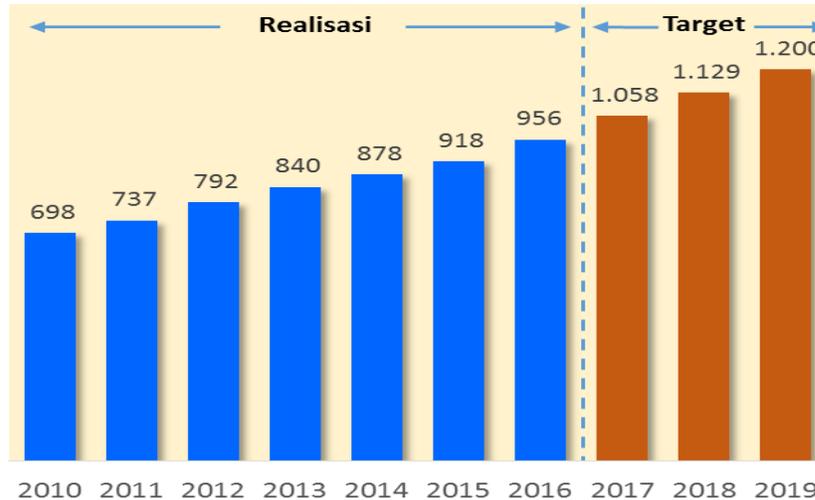
2.1. Kondisi Permintaan Tenaga Listrik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi yang handal termasuk tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya ekonomi pada suatu daerah mengakibatkan konsumsi tenaga listrik akan semakin meningkat pula. Kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar.



Gambar 2.1. Perkembangan konsumsi tenaga listrik nasional (TWh)
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

Konsumsi tenaga listrik Nasional seperti pada Gambar 2.1. tumbuh sekitar 8,99% pada tahun 2012, 7,73% pada tahun 2013, 5,74% pada tahun 2014, 6,11% pada tahun 2015 dan sekitar 5,46% pada tahun 2016. Apabila dilihat dari konsumsi per kapita sebagai berikut:

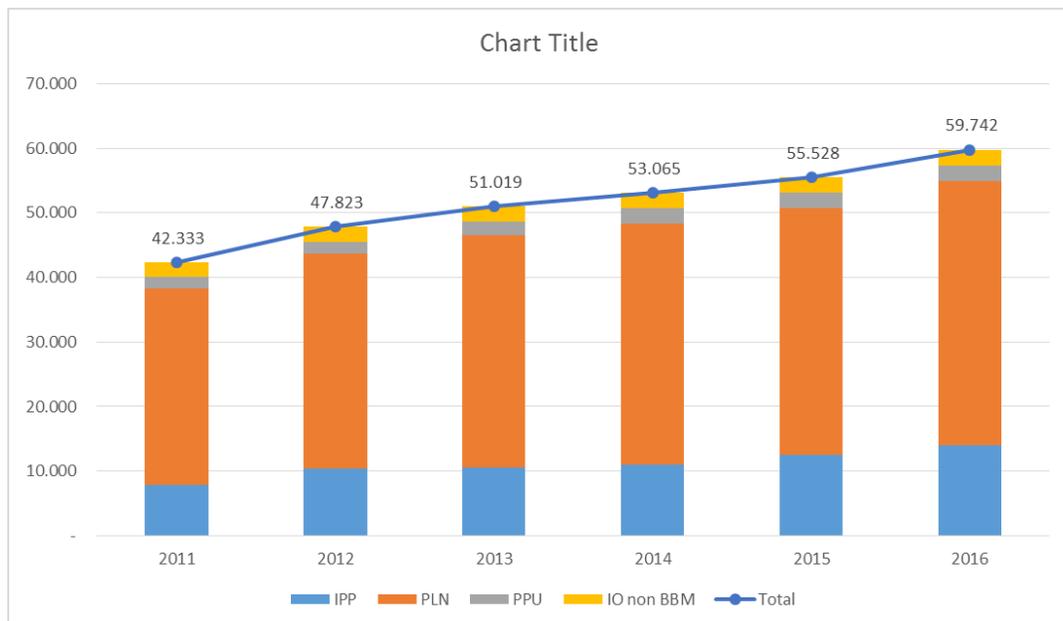


Gambar 2.2. Perkembangan konsumsi per kapita
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

Penurunan pertumbuhan konsumsi listrik pada periode 2012-2016 terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional yang cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Selain itu keterbatasan pada sisi pasokan pada beberapa daerah terutama di luar Jawa Bali turut berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan konsumsi.

2.2. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik Nasional tumbuh sekitar 12,97% pada tahun 2012, 6,68% pada tahun 2013, 4,01% pada tahun 2014, 4,64% pada tahun 2015, dan menjadi sekitar 7,59% pada tahun 2016. Penambahan kapasitas pembangkit secara total sekilas terlihat relatif besar namun sebarannya kurang proporsional, dimana daerah di Jawa Bali memiliki kecukupan pasokan sementara sebagian besar daerah di luar Jawa Bali mengalami keterbatasan.



Gambar 2.3. Perkembangan Kapasitas Pembangkit Terpasang (MW)

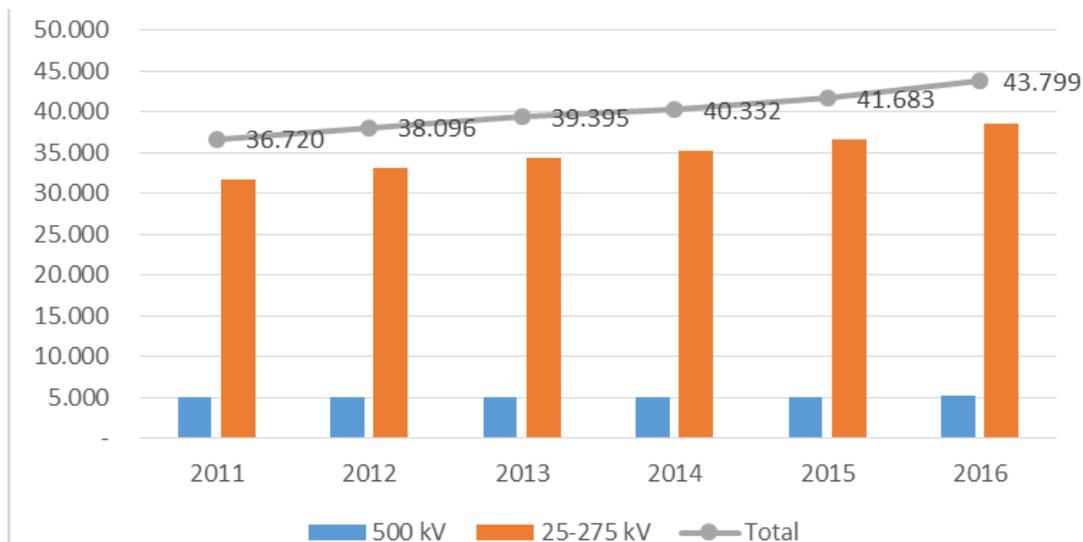
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

2.3. Kondisi Penyaluran Tenaga Listrik

Jaringan transmisi sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN (Persero), kecuali di beberapa daerah seperti di Pulau Batam dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Batam yang merupakan anak usaha PT PLN (Persero), sebagian kecil di Pulau Sulawesi dimiliki oleh swasta namun dioperasikan oleh PT PLN (Persero) dan di Pulau Papua dimiliki dan dioperasikan oleh swasta untuk kepentingan sendiri.

Saat ini sistem kelistrikan yang telah terintegrasi dengan baik hanya di pulau Jawa-Bali, dimana sistem kelistrikan Jawa-Bali menggunakan 3 jenis tegangan dalam sistem interkoneksinya, yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sebagai tulang punggung utama (*Back Bone*) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan 70 kV sebagai penerus ke pusat beban.

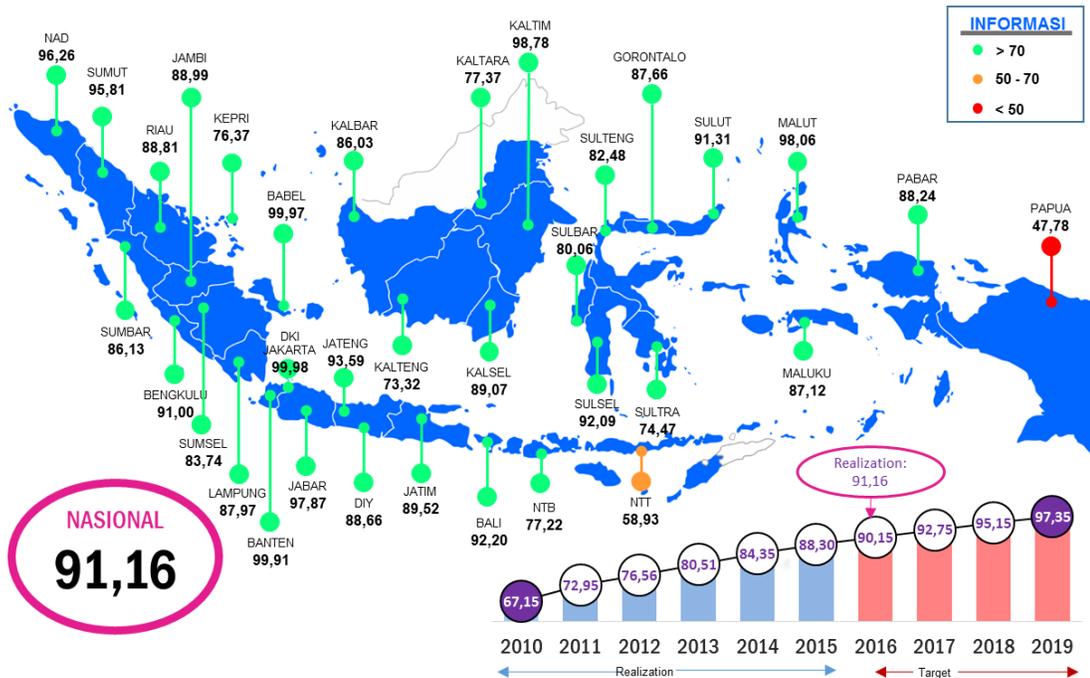
Total panjang jaringan transmisi tenaga listrik tersebut mengalami peningkatan sekitar 19,28% selama periode 5 tahun terakhir (2012-2016). Perkembangan panjang jaringan transmisi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4. Perkembangan Panjang Jaringan Transmisi (kms)
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

2.4. Rasio Elektrifikasi

Belum terlistrikinya seluruh wilayah Indonesia menjadi potensi investasi di bidang ketenagalistrikan. Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2016 sebesar 91,16%. Apabila dibandingkan Singapura sudah 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Malaysia 99,0%, Thailand 99,3%, dan Vietnam 98,0%.



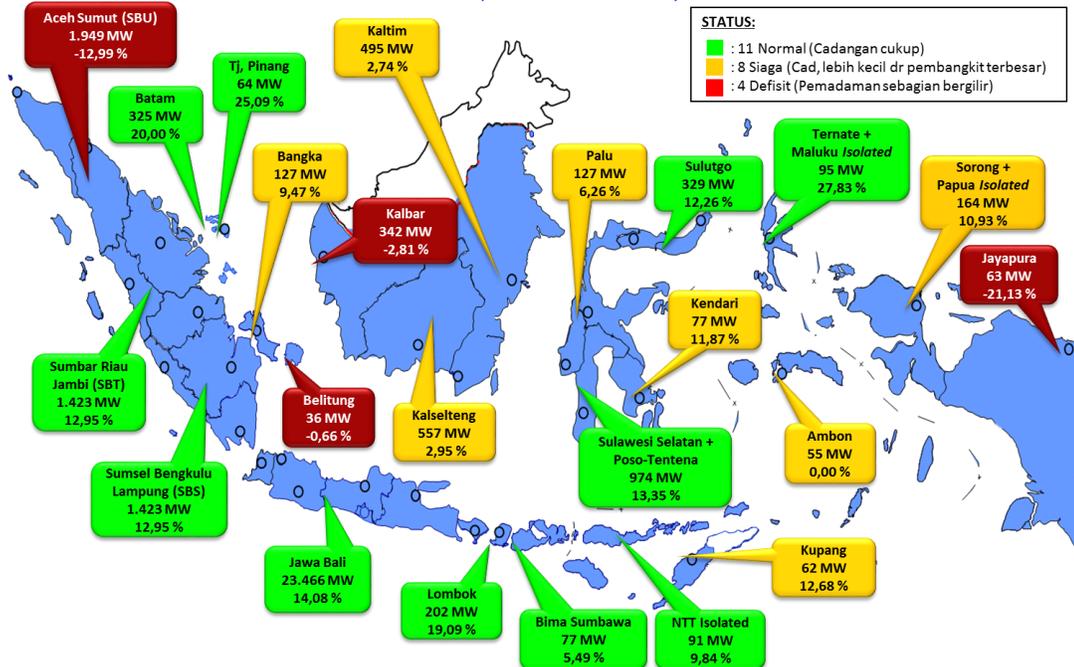
Gambar 2.5. Perkembangan Realisasi dan Rencana Rasio Elektrifikasi
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

2.5. Kondisi Pasokan Tenaga Listrik

Selain kondisi rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100%, kondisi pasokan tenaga listrik pada sistem kelistrikan nasional juga mencerminkan masih adanya ketimpangan antara *supply* dan *demand*, dengan kondisi tersebut tentunya masih ada peluang bagi para investor untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

KONDISI SISTEM KELISTRIKAN NASIONAL BERDASARKAN CADANGAN SISTEM OPERASI

(Status 7 Desember 2016)



Gambar 2.6. Kondisi Sistem Kelistrikan Nasional
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

2.6. Ketersediaan Sumber Energi Primer

Untuk mendukung pasokan energi primer pembangkit listrik baik yang eksisting maupun *on going*, potensi sumber energi primer masing-masing Provinsi yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Potensi Sumber Energi Primer

NO.	WILAYAH	ENERGI						
		BATUBARA ¹⁾	GA S BUMI ²⁾	MINYAK BUMI ²⁾	PANAS BUMI ³⁾		AIR ¹⁾	CBM ²⁾
		(JUTA TON)	(TSCF)	(MM STB)	(LOKASI)	(MWe)	(MW)	(TCF)
Sumatera								
1.	Aceh	450,64	6,93	150,68	19	1.307	1.655,1	-
2.	Sumatera Utara	27,22	1,29	110,67	16	2.762	1.241,5	-
3.	Sumatera Barat	953,95	-	-	18	1.788	625,1	0,5
4.	Riau dan Kep. Riau	2.490,74	8,06	3.386,67	1	25	-	52,50
5.	Kep. Natuna	-	50,48	373,23	-	-	-	-
6.	Batam	-	-	-	-	-	-	-
7.	Bangka Belitung	-	-	-	7	105	-	-
8.	Jambi	2.547,31	-	-	8	1.032	373,9	-
9.	Bengkulu	211,02	-	-	5	1.362	50,0	3,6
10.	Sumatera Selatan	69.030,82	18,30	1005,34	6	1.885	22,0	183
11.	Lampung	107,89	-	-	13	2.571	64,8	-
Jawa-Bali								
1.	Banten	18,80	-	-	5	613	-	-
2.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jawa Barat	-	3,18	494,89	40	5.839	2.137,5	0,8
4.	Jawa Tengah	0,82	-	-	14	1.961	360,0	-
5.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	1	10	-	-
6.	Jawa Timur	0,08	5,89	1.312,03	11	1.314	2.162,0	-
7.	Bali	-	-	-	6	354	-	-
Nusa Tenggara								
1.	NTB	-	-	-	3	175	-	-
2.	NTT	-	-	-	24	1.343	11,1	-
Kalimantan								
1.	Kalimantan Timur	63.287,03	14,36	573,50	4	30	168,0	106,3
2.	Kalimantan Barat	491,30	-	-	5	65	196,0	-
3.	Kalimantan Selatan	20.122,27	-	-	3	50	-	104,6
4.	Kalimantan Tengah	4.101,39	-	-	-	-	-	-
Sulawesi								
1.	Sulawesi Utara	-	-	-	9	875	16,0	-
2.	Gorontalo	-	-	-	5	250	-	-
3.	Sulawesi Tengah	1,98	2,58	-	18	718	670,2	-
4.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	12	311	82,8	-
5.	Sulawesi Selatan	231,24	-	51,87	14	468	1.567,8	2
6.	Sulawesi Barat	-	-	-	12	531	800,0	-
Maluku								
1.	Maluku	-	15,21	24,96	17	644	156,4	-
2.	Maluku Utara	8,22	-	-	13	427	-	-
Papua								
1.	Papua	9,33	-	-	3	75	49,0	-
2.	Papua Barat	126,48	23,90	65,97	-	-	-	-
TOTAL		157.181,48	150,18	7.549,81	312	28.910	12.411,2	453,3

Keterangan:

1) Sumber: Badan Geologi 2014

2) Sumber: Pusat Data dan Informasi KESDM 2014

3) Sumber: Buku Potensi Energi Panas Bumi Status 2014, Ditjen EBTKE

CBM : Coal Bed Methane

TSCF : Trillion Standard Cubic Feet

MMSTB : Million Metric Stock Tank Barrels

MWe : Mega Watt electric

MW : Mega Watt

TCF : Trillion Cubic Feet

BAB III

PELUANG INVESTASI KETENAGALISTRIKAN

3.1. Arah Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik

a. Arah pengembangan pembangkit

- **PLTU** masih dapat dikembangkan, namun mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi tinggi (*Clean Coal Technology*) untuk sistem yang telah mapan (Jawa-Bali dan Sumatera).
- **PLTG dan PLTA *pump storage*** dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan beban puncak dan meminimalkan atau membatasi pembangkit BBM yang beroperasi pada waktu beban puncak.
- **PLT-EBT** dikembangkan disamping untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik juga dalam rangka menurunkan tingkat emisi CO₂.
- **PLTN** dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan sebagai pilihan terakhir jika target porsi energi baru dan energi terbarukan menjadi paling sedikit sebesar 25% pada tahun 2025 tidak tercapai dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan secara ketat

b. Arah pengembangan transmisi tenaga listrik

- 2-5 tahun kedepan diprioritaskan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit baru program 35.000 MW.
- Transmisi tegangan 500 kV di luar sistem Jawa-Bali dan sistem Sumatera, transmisi tenaga listrik bertegangan arus searah (Direct Current – DC), dan smart grid dimungkinkan untuk dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sistem kelistrikan setempat, pertimbangan ekonomi dan ketersediaan teknologi.

- Transmisi tenaga listrik dengan menggunakan jenis kabel tanah (under ground cable) dimungkinkan untuk dilakukan pada tempat-tempat tertentu sepanjang memenuhi aspek teknis dan ekonomis.
 - Penambahan trafo atau pembangunan gardu induk baru diprioritaskan apabila pembebanan trafo pada GI terpasang sudah mencapai 70% dari kapasitasnya untuk sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali dan mencapai 80% dari kapasitasnya untuk sistem kelistrikan di Jawa-Bali.
 - Back-up sistem dapat dipertimbangkan untuk peningkatan keandalan sistem kelistrikan
- c. Arah pengembangan distribusi tenaga listrik
- Jaringan distribusi terisolasi dapat dikembangkan apabila pemenuhan tenaga listrik secara terintegrasi dengan sistem tenaga listrik lain dinilai kurang/tidak efisien.
 - Jaringan distribusi tenaga listrik dengan menggunakan jenis kabel tanah (under ground cable) dimungkinkan untuk dilakukan pada tempat-tempat tertentu sepanjang memenuhi aspek teknis dan ekonomis.
 - Jaringan distribusi tenaga listrik dengan teknologi smart grid dan kabel laut (submarine cable) antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem dan ketersediaan teknologi.
 - *Micro grid* dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keandalan dan mengoptimalkan bauran energi pembangkitan pada suatu daerah terpencil yang jauh dari sistem besar

3.2. **Proyek-Proyek Pembangkit Strategis**

a. Sistem Kelistrikan Jawa-Bali

- PLTU Jawa Tengah (2x950 MW): Proyek ini sangat strategis, merupakan proyek kelistrikan pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, saat ini dalam proses pembebasan lahan.
- PLTU Indramayu (1x1.000 MW): Proyek ini sangat strategis, relatif dekat dengan pusat beban di Jabodetabek, saat ini dalam tahap persiapan pembebasan lahan.
- PLTU Jawa-1 (1.000 MW): dikembangkan sebagai ekspansi dari IPP yang telah beroperasi dengan titik koneksi ke GITET Mandirancan.
- PLTU Jawa-3 (2x660 MW): dapat dialokasikan untuk PLTU IPP Tanjung Jati A yang akan dikembangkan oleh PT TJPC, atau pembangunan PLTU baru oleh IPP, dengan titik koneksi ke switching station 500 kV antara Pemalang dan Indramayu.
- PLTU Jawa-4 (2x1.000 MW): dapat dikembangkan sebagai ekspansi dari IPP yang telah beroperasi, atau pembangunan PLTU baru oleh IPP, dengan titik koneksi ke GITET Tanjung Jati atau di tempat lain sesuai kebutuhan sistem.
- PLTU Jawa-5 (2x1.000 MW) akan dilaksanakan oleh IPP eksisting dengan alternatif lokasi di Provinsi Jawa Barat/Banten dengan titik koneksi GITET Balaraja atau Incomer SUTET 500 kV Tasik - Depok.
- PLTU Jawa-6 (2x1.000 MW) dengan alternatif lokasi di Provinsi Jawa Barat/Banten.
- PLTU Jawa-7 (2x1.000 MW) lokasi di Bojonegara diatas lahan PLN seluas 170 ha, saat ini dalam tahap financial closing,

dikembangkan sebagai proyek IPP dengan titik koneksi Incomer - double pi SUTET Suralaya Baru – Bojanegara – Balaraja Baru.

- PLTU Jawa-8 (1.000 MW) akan dilaksanakan oleh pengembang eksisting yang berlokasi di provinsi Jawa Tengah.
- PLTU Jawa-9 (600 MW) dapat dikembangkan sebagai ekspansi dari IPP yang telah beroperasi, atau pembangunan PLTU baru oleh IPP di provinsi Banten.
- PLTU Jawa-10 (660 MW) akan dilaksanakan oleh PLN atau IPP yang berlokasi di provinsi Jawa Tengah atau Jawa Barat.
- PLTGU Jawa-1 (2x800 MW) akan dikembangkan oleh IPP dengan lokasi di provinsi Jawa Barat dekat pusat beban Jakarta.
- PLTGU Jawa-2 (1x800 MW) akan dikembangkan oleh PLN di lokasi Priok dekat pusat beban Jakarta.
- PLTGU Jawa-3 (1x800 MW), tambahan pembangkit load follower yang berlokasi di Jawa Timur, diharapkan ketersediaan gas dari blok Cepu atau sumber lain di Jawa Timur.
- PLTGU Jawa-4 (2x800 MW), PLTGU Jawa-5 (2x800 MW), PLTGU Jawa-6 (2x800 MW) dan PLTGU Jawa-7 (2x800 MW) merupakan pembangkit baru untuk memenuhi target bauran energi dari gas sekitar 24% pada 2025 serta sebagai kontingensi apabila target bauran energi dari EBT tidak terpenuhi. Indikasi lokasi di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mempunyai infrastruktur gas dan potensi pasokan gas yang cukup besar.
- PLTMG Senayan 100 MW sangat strategis karena berlokasi di pusat beban Jakarta dan berfungsi untuk meningkatkan keandalan pasokan sistem MRT (sebagai back up pasokan dari GI CSW dan GI Pondok Indah) serta memenuhi kebutuhan pembangkit blackstart unit pembangkit Muara Karang dan Priok.

- PLTU/GU Madura (400 MW) berfungsi untuk meningkatkan keandalan dan kualitas pasokan listrik di Pulau Madura, serta mengurangi ketergantungan dari grid Surabaya yang sudah sulit mendapatkan tambahan pasokan dari pembangkit baru maupun dari GITET baru.
- b. Sistem Kelistrikan Luar Jawa-Bali (Sumatera)
- Proyek PLTU Percepatan Tahap I (PLTU Tarahan dan PLTU Tenayan), PLTA Peusangan 1-2 serta PLTA Asahan III, merupakan pembangkit pembangkit yang sangat strategis karena selain proyek-proyek ini akan dapat memasok kebutuhan beban dasar, sekaligus juga akan memperbaiki BPP LWBP di sistem Sumatera.
 - Pembangkit-pembangkit Peaker yaitu: Sumbagut-2 (250 MW), Riau (200 MW), Jambi (100 MW) dan Lampung (200 MW) merupakan proyek pembangkit strategis yang harus segera diselesaikan karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sistem Sumatera pada saat beban puncak yang saat ini masih dioperasikan dengan BBM.
 - Pembangkit MPP merupakan proyek yang strategis, karena pembangkit ini bersifat moveable sehingga dapat dipindahkan ketempat-tempat yang sedang mengalami kekurangan pasokan daya akibat keterlambatan proyek pembangkit.
 - Pembangkit skala besar (PLTU MT Sumsel 8 2x600 MW, Sumsel 9 2x600 MW, dan Sumsel 10 1x600 MW) yang energinya akan disalurkan juga ke Sistem Jawa melalui saluran transmisi 500 kV HVDC. Pembangkit tersebut harus dapat diselesaikan selaras dengan penyelesaian proyek interkoneksi Jawa-Sumatera 500 kV HVDC.

- PLTU Jambi (2x600 MW), PLTU MT Riau-1 (600 MW), PLTA Merangin 350 MW di Provinsi Jambi, serta PLTA Batang Toru 510 MW di provinsi Sumatera Utara merupakan proyek IPP strategis karena akan memenuhi kebutuhan sistem Sumatera dan sekaligus menurunkan BPP.
- c. Sistem Kelistrikan Luar Jawa-Bali (Indonesia Timur)
- Pembangunan transmisi 275 kV interkoneksi Kalbar–Serawak yang membentang dari Bengkayang sampai perbatasan Serawak yang direncanakan selesai tahun 2015, serta proyek transmisi 150 kV yang terkait dengan interkoneksi ini.
 - Proyek pembangkit FTP1 yaitu Parit Baru dan Pantai Kura-Kura serta proyek pembangkit Parit Baru FTP2 dan pembangkit Kalbar peaker.
 - Proyek pembangkit FTP1 yaitu PLTU Kalteng 2x60 MW di Pulang Pisau dan PLTU Kaltim 2x110 MW di Teluk Balikpapan.
 - Proyek pembangkit FTP2 yaitu PLTU IPP Kalsel 2x100 MW, PLTU IPP Kaltim 2x100 MW, PLTG/MG Bangkanai total kapasitas 295 MW.
 - Proyek pembangkit reguler yaitu PLTU Kalselteng 1 (2x100 MW), Kalselteng 2 (2x100 MW), Kalselteng 3 (2x100 MW), Kaltim 3 (1x200 MW), Kaltim 4 (2x100 MW), Kaltim 5 (1x200 MW) dan Kaltim 6 (1x200 MW).
 - Proyek pembangkit peaker yaitu: Kalsel Peaker 1 (200 MW), Kalsel Peaker 2(100 MW), Kaltim Peaker 2 (100 MW) dengan bahan bakar LNG.
 - Proyek pembangkit load follower yaitu: Kalsel 1 (Load Follower) 200 MW, Kaltim 1 (Load Follower) 200 MW dengan bahan bakar LNG.

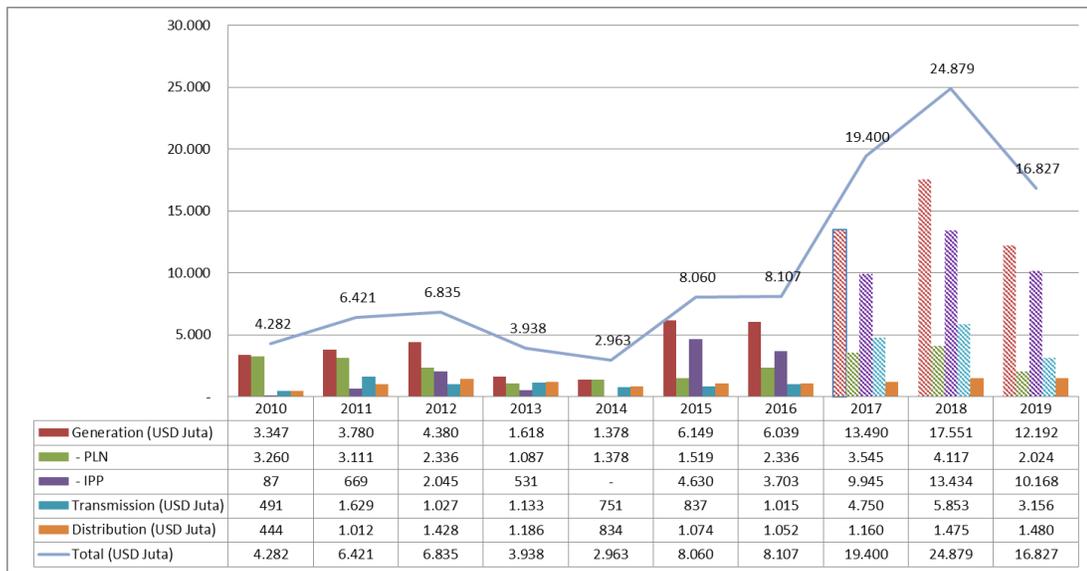
- Mobile power plant (MPP) 30 MW di Kaltim dengan bahan bakar dual fuel untuk memenuhi kebutuhan beban dan bersifat jangka pendek.
- Pembangunan PLTMG berbahan bakar dual fuel di beberapa sistem isolated di Kalimantan Utara yaitu di Malinau dan di Tanjung Selor untuk memenuhi kebutuhan beban di daerah tersebut yang tumbuh pesat setelah terbentuk Provinsi Kalimantan Utara.
- Penyiapan kecukupan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit peaker tersebut termasuk pembangkit eksisting dan MPP.
- Proyek pembangkit FTP1 yaitu PLTU Gorontalo (2x25 MW) dan PLTU Sulut 1 (2x50 MW).
- Proyek pembangkit FTP2 yaitu PLTP IPP Lahendong 5 dan 6 (2x20 MW), Proyek pembangkit reguler PLTU yaitu Sulut 3 (2x50 MW), Sulbagut 1 (2x50 MW), Sulbagut 3 (2x50 MW) dan Sulbagut 2 (2x100 MW).
- Proyek pembangkit peaker yaitu Minahasa Peaker 150 MW, Gorontalo Peaker 100 MW.
- Proyek pembangkit FTP2 yaitu PLTU Punagaya 2x100 MW, PLTA Malea 90 MW, PLTA Buttu Batu 2x100 MW, PLTP Bora Pulu 40 MW serta PLTP Marana 20 MW.
- Proyek pembangkit reguler PLTU yaitu Sulsel Barru 2 (1x100 MW), Jeneponto 2 (2x125 MW), Sulsel 2 (2x200 MW), Palu 3 (2x50 MW), Kendari 3 (2x50 MW).
- Proyek pembangkit peaker yaitu Makassar Peaker 450 MW, Sulsel Peaker 450 MW dengan indikasi lokasi di Maros.
- Proyek pembangkit hydro yang dikembangkan oleh pihak swasta sebagai proyek IPP dan proyek yang dikembangkan oleh pihak PLN sebagai proyek EPC PLN.

- Proyek pembangkit FTP1 yaitu PLTU 2 di NTB Lombok/Jeranjang 2x25 MW, Proyek pembangkit FTP2 PLTU Lombok 2x50 MW untuk memenuhi kebutuhan beban yang terus meningkat.
- Proyek pembangkit IPP PLTU Lombok Timur 2x25 MW dalam tahap konstruksi, diharapkan tahun 2017 sudah beroperasi.
- Proyek pembangkit Lombok Peaker 150 MW dengan bahan bakar gas yang disimpan dalam bentuk CNG untuk memenuhi kebutuhan beban puncak.

Adapun untuk proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang masih bisa ditawarkan ke investor baik proyek IPP maupun EPC adalah sebagaimana terlampir.

3.3. Realisasi dan Rencana Kebutuhan Investasi

Kebutuhan Investasi PT PLN (Persero) dalam pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan seiring pertumbuhan konsumsi tenaga listrik, dimana untuk pembangunan penyediaan tenaga listrik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2016-2020) membutuhkan pendanaan sekitar Rp 1.019 Trilyun atau rata-rata Rp 204 Trilyun per tahun. Kebutuhan pendanaan tersebut untuk mendanai proyek-proyek PT PLN (Persero) baik pembangkit, penyaluran dan distribusi, serta proyek-proyek milik swasta atau *Indenpendet Power Producer* (IPP). Apabila merujuk pada data histori pendanaan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran PLN (APLN) memperlihatkan adanya Gap antara kebutuhan dan pemenuhan. Gap tersebut tentunya akan menjadi tantangan bagi Pemerintah dan PT PLN (Persero) kedepan dalam membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik.



Gambar 3.1. Perkembangan Realisasi (2010-2016) dan Rencana Investasi (2017-2019)
(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

BAB IV

MEKANISME INVESTASI

4.1. Kebijakan Investasi

Terdapat beberapa hal terkait kebijakan investasi di sub sektor ketenagalistrikan, yaitu:

- ❑ Mendorong dan meningkatkan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi swasta pada bisnis sektor ketenagalistrikan.
- ❑ Meningkatkan kemampuan PT PLN (Persero) untuk berinvestasi di bidang infrastruktur penyediaan tenaga listrik.
- ❑ Mendorong investasi swasta dan badan usaha lainnya, khususnya di sisi pembangkitan melalui mekanisme *Independent Power Producer* (IPP) termasuk melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).
- ❑ Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan.
- ❑ Pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

4.2. Skema Partisipasi Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik

a. Skema bisnis dan partisipasi swasta dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik terdiri dari 3 macam, yaitu:

❑ ***Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract***

Pemilik proyek adalah PLN. Proyek *Engineering Procurement and Construction (EPC)* ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini PLN akan bertanggung jawab atas aktifitas dan biaya perencanaan, pengadaan lahan, pendanaan dan operasi pembangkit. Contoh: Pembangunan pembangkit program FTP I dan program 35 GW.

❑ ***Independence Power Producer (IPP) – Program Reguler/Percepatan***

Pemilik proyek sekaligus pelaksana EPC adalah pihak swasta, dimana 100% pembiayaan berasal dari swasta dan ditransformasikan melalui harga jual tenaga listrik. Pembiayaan tersebut meliputi dana untuk pembangunan, pembebasan lahan, pengoperasian aset. Dimana aset tersebut setelah selesai jangka waktu kontrak akan ditransfer ke PT PLN (Persero). Contoh: Proyek-proyek IPP dalam program 35 GW.

❑ ***Independence Power Producer – melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) Project***

Proyek pemerintah yang ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau jaminan pemerintah. Apabila pihak swasta sebagai inisiator proyek, pemerintah dapat memberikan kompensasi. Contoh: Proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW.

b. Skema bisnis dan partisipasi swasta dalam pembangunan transmisi dan gardu induk

❑ ***Supply and Erect***

PLN akan membeli peralatan dari penyedia transmisi dan gardu induk melalui proses pengadaan sesuai ketentuan PLN dan PLN juga akan melakukan pengadaan kontraktor yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan konstruksi dan pemasangan transmisi dan gardu induk

❑ ***Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract***

PLN akan menunjuk kontraktor EPC yang bertanggung jawab atas pengadaan peralatan transmisi dan gardu induk serta melakukan kegiatan konstruksi dan pemasangan dan PLN akan membayar kontraktor EPC sesuai dengan termin pembayaran dan kemajuan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian.

□ ***Deferred Payment***

PLN akan menunjuk kontraktor yang bertanggung jawab atas pendanaan, pengadaan peralatan transmisi dan gardu induk serta melakukan kegiatan konstruksi dan pemasangan dan PLN secara bertahap akan membayar kontraktor setelah transmisi dan gardu induk selesai sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

4.3. Mekanisme Partisipasi Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Tenaga Listrik

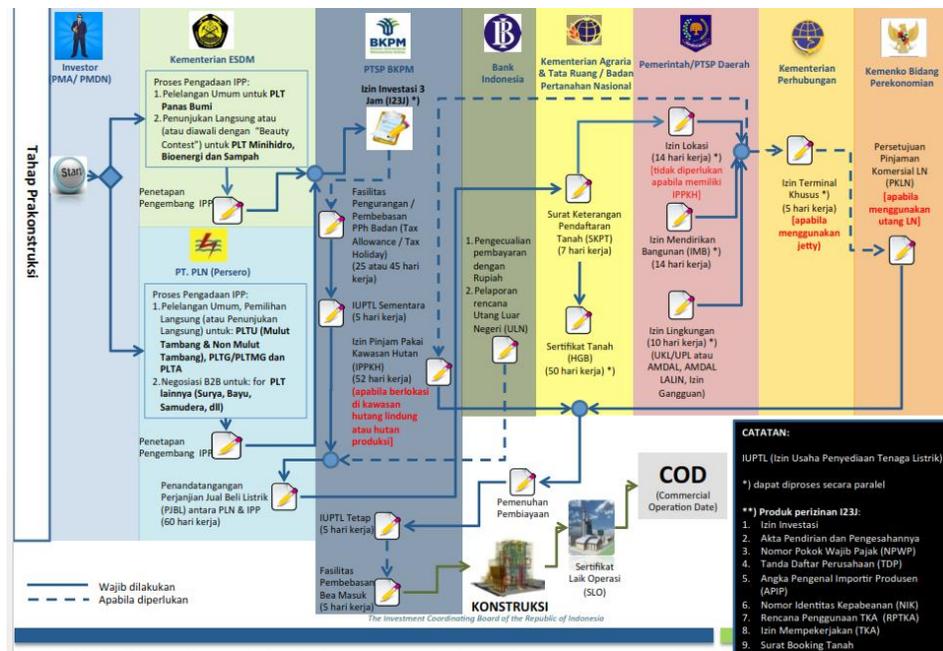
a. Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract

Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya di lingkungan PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan/atau terikat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *term & conditions* pada web-ProcurementPT PLN (Persero) sebagai berikut:

<http://eproc.pln.co.id/assets/portal/doc/Term%20of%20Conditions.pdf>

b. *Independence Power Producer (IPP)*

IPP dalam partisipasi investasi penyediaan tenaga listrik harus mengikuti peraturan dan prosedur pengadaan, proses perizinan sebagai berikut :

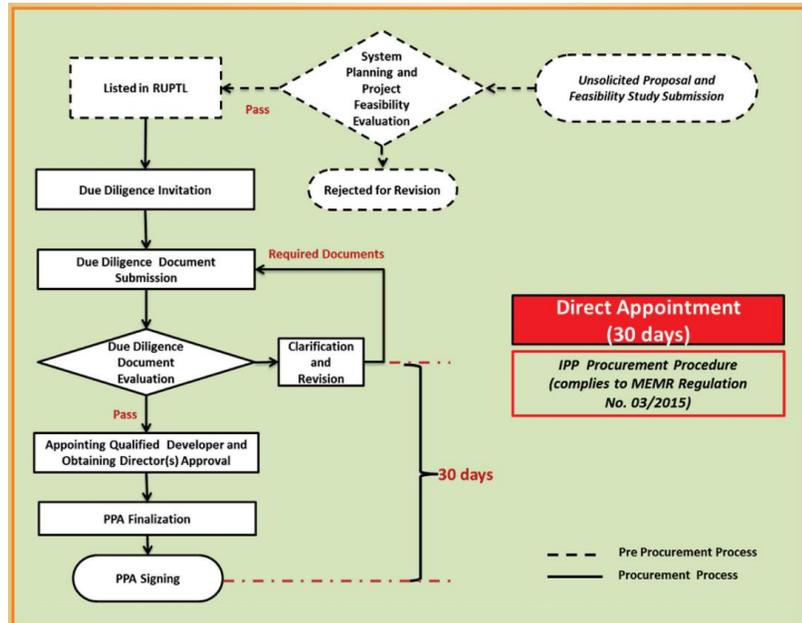


Gambar 4.1. Proses Perizinan IPP

(sumber: Paparan BKPM)

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, pembelian tenaga listrik oleh PIUPL dari pihak lain pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum. Namun demikian, dalam kondisi tertentu pembelian tenaga listrik dari pihak ketiga dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung, dengan prosedur pengadaan sebagai berikut:

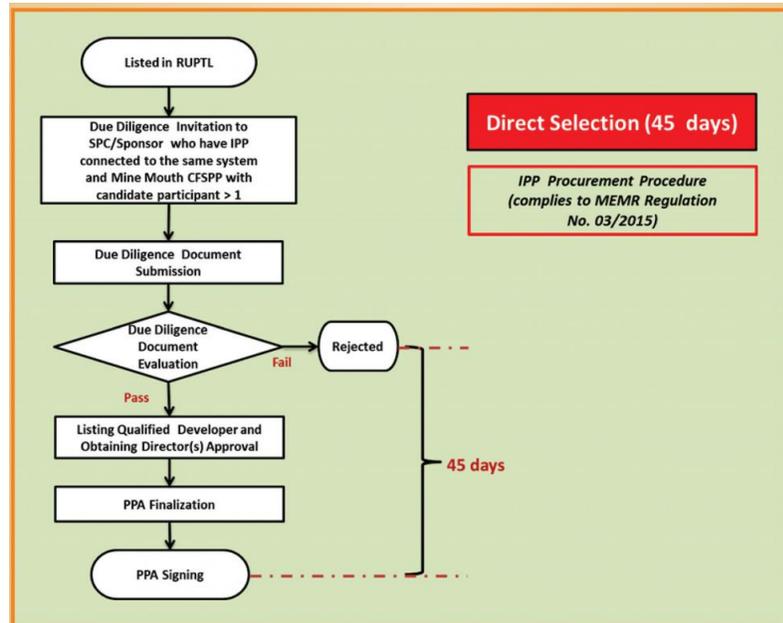
1. Prosedur Pengadaan IPP dengan Penunjukan Langsung Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2015



Gambar 4.2. Prosedur Pengadaan IPP dengan Penunjukan Langsung

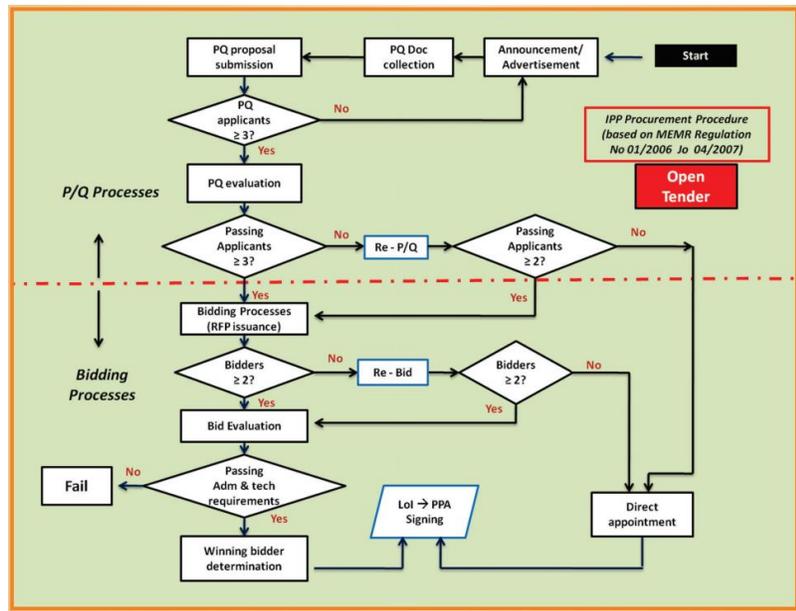
(Sumber: PT PLN (Persero))

2. Prosedur Pengadaan IPP dengan Pemilihan Langsung Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2015



Gambar 4.3. Prosedur Pengadaan IPP dengan Pemilihan Langsung (Sumber: PT PLN (Persero))

3. Prosedur Pengadaan IPP dengan Lelang Umum (*Open Tender*) Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2007



Gambar 4.4. Prosedur Pengadaan IPP dengan Pemilihan Langsung

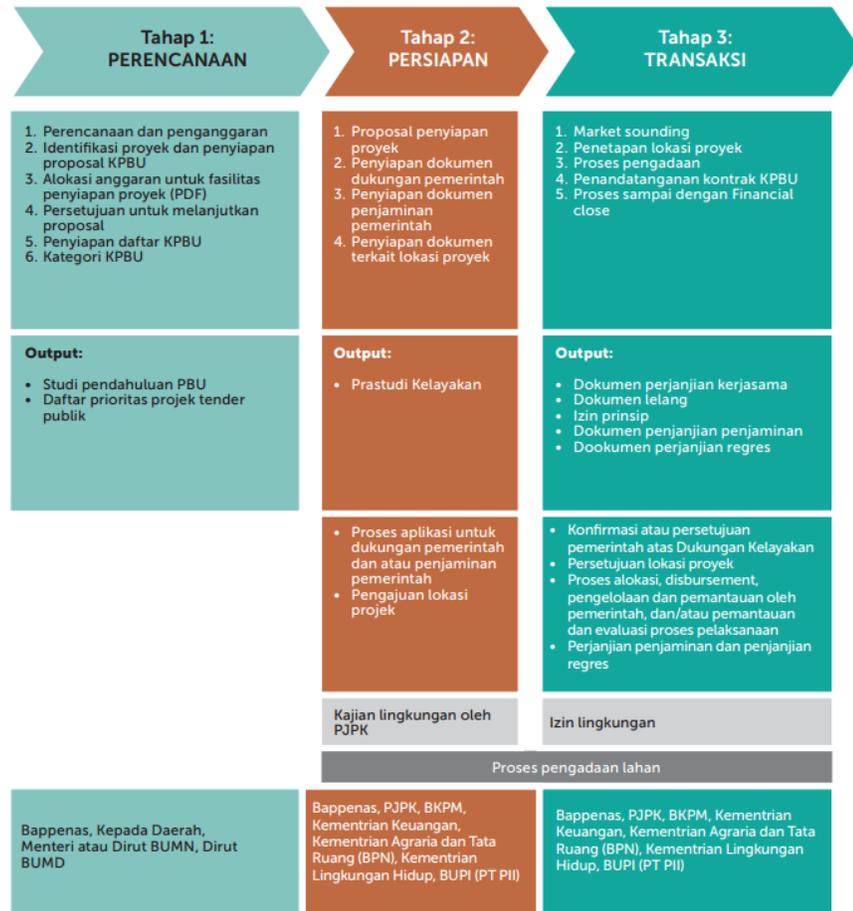
(Sumber: PT PLN (Persero))

c. *Public Private Partnership (PPP) Project* atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Latar belakang KPBU, dilakukan dengan tujuan untuk Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme

pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Dasar hukum pelaksanaan proyek-proyek KPBU yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

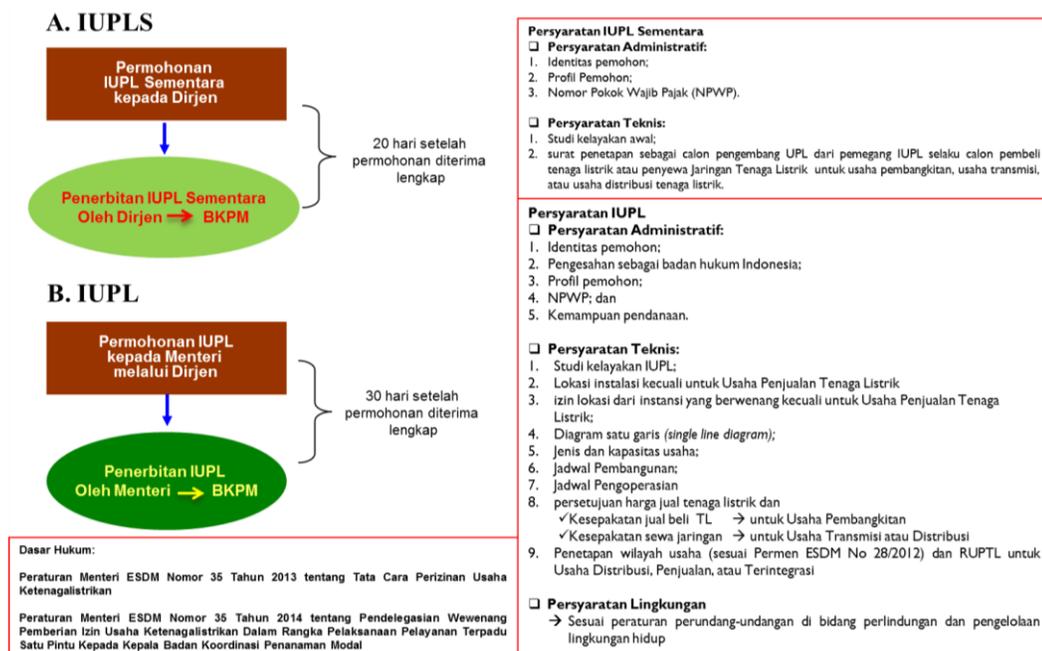


Gambar 4.5. Tahapan Pelaksanaan Proyek KPBU

(Sumber: PT PII)

4.4. Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPLS) dan IUPL dikeluarkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, namun sejak adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikoordinasikan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada awal tahun 2015, 10 (sepuluh) perizinan usaha sudah didelegasikan ke BKPM, dengan 6 (enam) perizinan usaha diantaranya merupakan perizinan di bidang ketenagalistrikan. Untuk memperlancar pelaksanaan proses perizinan di PTSP BKPM yang memerlukan rekomendasi teknis, Kementerian ESDM menempatkan pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis dan/atau perizinan operasional, dengan syarat-syarat perizinan sebagai berikut:



Gambar 4.6. Syarat-syarat perizinan IUPLS dan IUPL

(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

Dimana proses perizinan di PTSP BKPM sebagai berikut:



Gambar 4.7. Proses Perizinan di PTSP Pusat

(Sumber: BKPM)

4.5. Kewenangan dan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, pihak swasta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan kebijakan atas otonomi daerah telah diatur pembagian kewenangan penerbitan izin usaha ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Menteri dan Gubernur. Pembagian kewenangan penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- a. Gubernur untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota.
- b. Menteri, untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi; dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.

4.6. Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (sesuai Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 dan Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2014)

a. IUPLS

- Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis seperti pada Gambar 4.6.
- Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian seperti pada Gambar 4.8.
- Pemberian atau penolakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara ditolak, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

A. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... , ... 20...
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara untuk usaha pembangkitan/transmisi/distribusi/terintegrasi tenaga listrik di ..., dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak;
2. Data Teknis :
 - a. studi kelayakan awal; dan
 - b. surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu^{*)} Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

**) Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

Gambar 4.8. Format Surat Permohonan dan Formulir Isian Permohonan IUPLS

(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

b. IUPL

- Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan seperti pada Gambar 4.6.
- Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian seperti pada Gambar 4.9.
- Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Menteri menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

A. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20...
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk pembangkit/transmisi/distribusi/penjualan/terintegrasi tenaga listrik di ... dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi :
 - a. identitas pemohon
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. kemampuan pendanaan;
2. Data Teknis :
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - d. diagram satu garis;
 - e. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - f. jadwal pembangunan;
 - g. jadwal pengoperasian;
 - h. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik;
 - i. kesepakatan jual beli tenaga listrik dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik;
 - j. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha transmisi tenaga listrik atau usaha distribusi tenaga listrik; dan
 - k. penetapan wilayah usaha oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.
3. Dokumen Lingkungan

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu^{*)} Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lengkap)

*) Sesuaikan dengan keperluan

Gambar 4.9. Format Surat Permohonan dan Formulir Isian Permohonan IUPL

(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

c. Izin Operasi

- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Menteri.
- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Provinsi, dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Provinsi, dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

A. SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASI

K O P S U R A T B A D A N U S A H A

Nomor : , 20...
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Operasi

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 20 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi dengan kelengkapan dokumen:

1. Data Administrasi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak;
2. Data Teknis :
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
3. Data Lingkungan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu* Menteri, kami ucapkan terima kasih.

* Sesuai dengan keperluan

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

>Nama Lengkap)

Gambar 4.10.Format Surat Permohonan dan Formulir Isian Permohonan IO

(Sumber: Ditjen Ketenagalistrikan)

Merujuk Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM, bahwa kewenangan perizinan antara lain IUPLS,IUPL dan IO didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana Kepala BKPM dalam memberikan izin usaha bertindak atas nama Menteri ESDM.

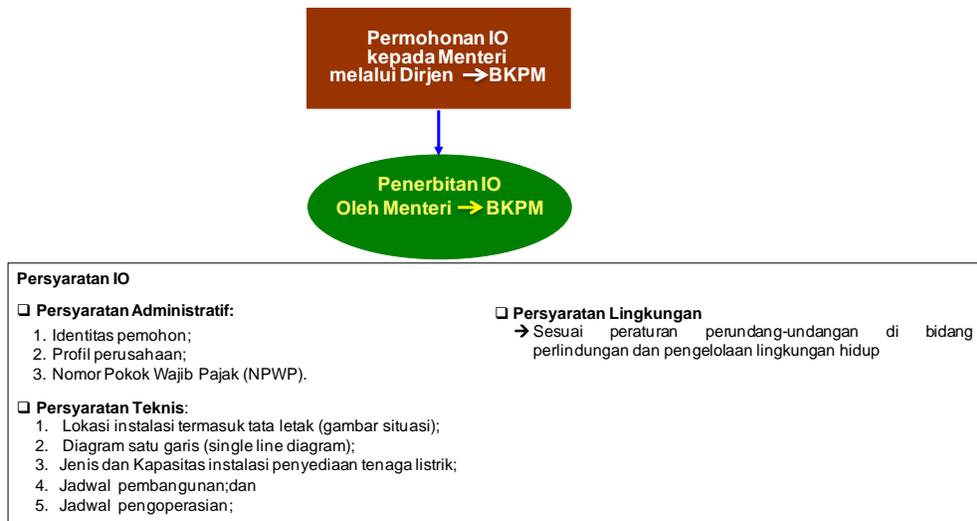


Figure 4.11: Formal Procedures of Submitting Operation Permits
(Source: Ditjen Ketenagalistrikan)

4.7. Private Power Utility (PPU)

Sesuai Permen ESDM No.35/2013, bahwa PPU merupakan pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang meliputi usaha:

- Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- Pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Ketentuan UPTLSK dengan penugasan dari Pemerintah (bersubsidi) yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber EBT, mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri (standar minimum TKDN), Menggunakan tarif tenaga listrik PLN untuk konsumen rumah tangga 450 VA, mengupayakan tingkat capaian RE 95% selama 5 tahun sejak penugasan, dan membangun infrastruktur dan berfungsi paling lama 1 tahun setelah penugasan. Adapun mekanisme UPTLSK dengan penugasan Pemerintah sebagai berikut:



Gambar 4.14. Mekanisme UPTLSK dengan Penugasan Pemerintah

4.9. Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa usaha transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum, dan untuk usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dan/atau distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi dan/atau distribusi setelah mendapat persetujuan harga atas sewa dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Adapun pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi tersebut harus memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan

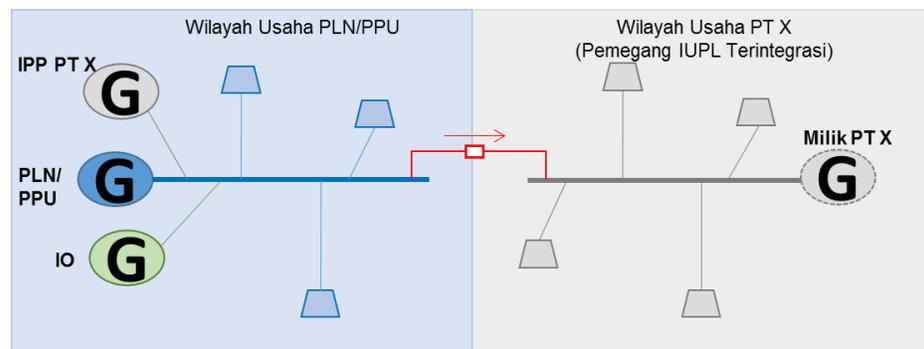
transmisi dan/atau distribusi. Sebagai pedoman pelaksanaan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik.

Ketentuan Kerjasama Antar Pemegang Wilayah Usaha

- Antar pemegang wilayah usaha dapat bekerjasama secara langsung dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya.
- Dilakukan antar Pemegang Wilayah Usaha yang telah beroperasi, yaitu telah mempunyai: konsumen dan pembangkit atau kontrak jual beli tenaga listrik secara curah.
- Tidak memerlukan IUPL baru.
- Harga jual tenaga listrik mendapat persetujuan dari pemberi IUPL sebagai pembeli tenaga listrik.
- Apabila telah ditetapkan harga patokan, jual beli dapat dilaksanakan berdasarkan harga patokan.

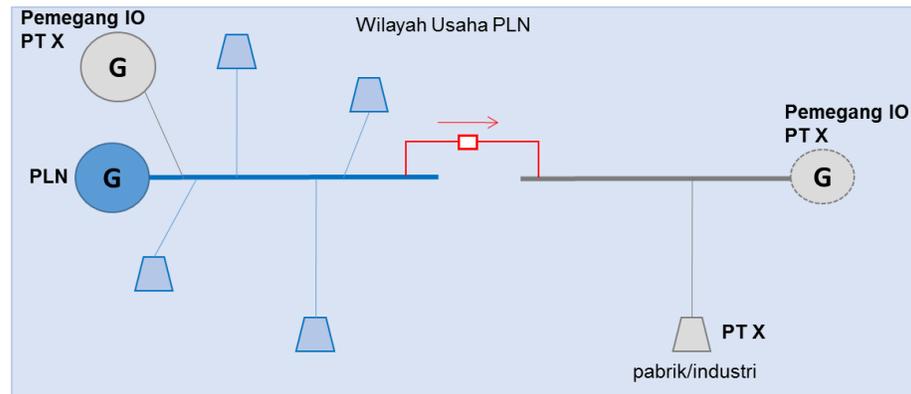
Contoh 1 Skema Sewa Transmisi

1. Penyaluran TL oleh IPP ke wilayah usaha PT X (Pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha)
2. Pembelian (kerjasama) sesama wilayah usaha
3. Pembelian dari pemegang IO diluar wilayah usaha PT X



Gambar 4.15. Contoh 1 Skema Sewa Transmisi

Contoh 2 Pemegang IO (pemilik captive power) menyewa transmisi PLN / PPU lain untuk menyalurkan listrik ke perusahaan sendiri di lokasi yang berbeda



Gambar 4.16. Contoh 2 Skema Sewa Transmisi

4.10. Pelayanan Investasi Prioritas

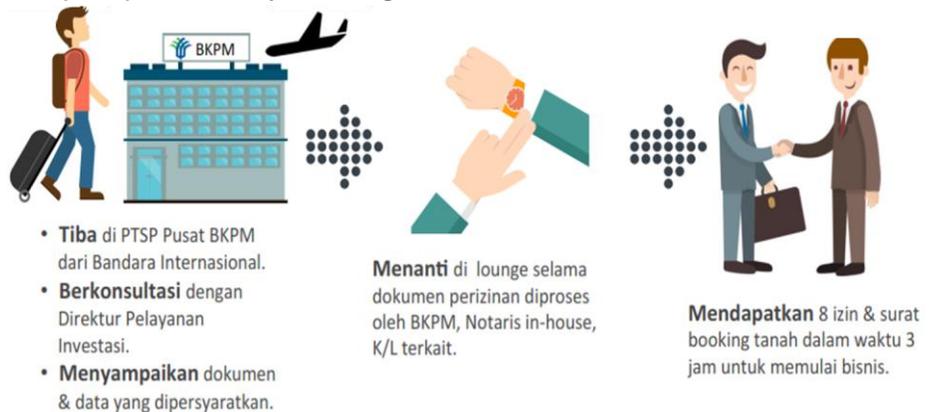
Untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di sektor prioritas, BKPM mengeluarkan kebijakan pelayanan prioritas sebagai berikut:

a. Izin Investasi 3 Jam

Berlaku untuk investor yang memiliki rencana investasi (baru atau perluasan) minimal sebesar Rp 100 Milyar (USD 8 Juta) dan/atau mempekerjakan 1.000 TKI.

Izin investasi 3 jam akan memperoleh 9 izin yaitu: Izin investasi, akta pendirian perusahaan & pengesahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), Izin mempekerjakan TKA (IMTA), Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), Surat booking tanah.

Adapun prosedurnya sebagai berikut:



Gambar 4.17. Prosedur Izin Investasi 3 Jam
(Sumber : BKPM)

b. Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

Investor secara langsung memulai konstruksi proyeknya sebelum memperoleh perizinan terkait konstruksi, tanpa persyaratan nilai minimal investasi atau TKI dan berlaku untuk beberapa kawasan industri. Adapun untuk perizinan terkait konstruksi dapat diurus secara paralel sambil melakukan konstruksi.



Gambar 4.18. Prosedur Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi
(Sumber : BKPM)

4.11. Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Dalam mendukung dan mempercepat program pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Pemerintah memberikan insentif fiskal dan non fiskal sebagai berikut:

a. Non Fiskal

- ❖ Penyederhanaan mekanisme pembelian tenaga listrik oleh PLN dari pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik (IUPTL) atau Izin Operasi (IO). (Permen ESDM No. 3/2015)
- ❖ Penyederhaan prosedur perizinan di tingkat pusat dan daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- ❖ Harga Pembelian tenaga listrik menggunakan harga patokan untuk pembangkit dari Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Non EBT dengan BPP Pembangkitan sebagai acuan. (Lampiran III, IV, V & VI)

b. Fiskal

- ❖ Pembebasan bea masuk impor barang modal untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum (tidak termasuk transmisi, distribusi dan jasa penunjang). (PMK No.66/2015)
- ❖ Pemberian fasilitas *tax allowance* untuk investasi pembangkit listrik memanfaatkan sumber energi baru terbarukan. (PP No.18/2015, PMK No.89/2015, dan Perka BKPM No.18/2015)
- ❖ Pemberian fasilitas *tax holiday* (sesuai PP No. 94/2010, PMK No. 159/2015, dan Perka BKPM No. 19/2015) dengan pembebasan PPh Badan selama periode 5 s.d. 15 Tahun mulai sejak COD, diberikan kepada industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas

yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional yang mencakup:

- a. Industri logam hulu
- b. Industri pengilangan minyak bumi;
- c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
- d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri
- e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan
- f. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi
- g. Industri transportasi kelautan
- h. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan atau
- i. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Adapun kriteria yang mendapatkan *tax holiday*:

- ✓ Merupakan Wajib Pajak baru
- ✓ Investasi minimal Rp. 1 Triliun (nilai USD sesuai nilai tukar berlaku saat pengajuan)
- ✓ Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal
- ✓ Menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi dan dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi investasi.
- ✓ Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah 15 Agustus 2011

4.12. Jaminan Pemerintah

Selain diberikan dukungan/insentif, Pemerintah juga memberikan jaminan sebagai berikut :

No	Regulasi	Jenis Jaminan	Keterangan
1	Perpres 91/2007, Perpres 91/2007, dan PMK 44/2008	Jaminan penuh – Jaminan atas semua kewajiban PLN kepada kreditur	Fast Track Program Phase 1 (FTP 1) 10.000
2	Perpres 78/2010, Perpres 38/2015, PMK 260/2010, dan PMK 170/2015	Jaminan terhadap kewajiban finansial PJKP (K/L, Pemda, BUMN/BUMD) kepada Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama	<i>Public and Private Partnership (PPP)</i>
3	Perpres 82/2015 dan PMK 189/2015	Jaminan penuh – Jaminan atas semua kewajiban BUMN kepada kreditur	Pinjaman BUMN kepada Lembaga Keuangan Internasional (<i>Direct Lending</i>)
4	Perpres 4/2016, PMK 130/2016	<ul style="list-style-type: none">• Jaminan pinjaman untuk mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan Percepatan PIK melalui skema swakelola.• Jaminan Kelayakan Usaha untuk mendukung PT PLN dalam melaksanakan Percepatan PIK melalui skema kerjasama	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Proyek Pembangkit Tenaga Listrik swasta/*unallocated* (Status Rencana)

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
1	Aceh	Swasta	PLTA	Redelong	18	2019	Reguler	35 GW
2	Aceh	Swasta	PLTA	Meureubo-2	59	2021	Reguler	
3	Aceh	Swasta	PLTA	Tampur-1	214	2025	Reguler	
4	Aceh	Swasta	PLTA	Tampur-1	214	2025	Reguler	
5	Aceh	Swasta	PLTA	Kluet (PLTA tersebar ACEH)	87	2025	Reguler	
6	Aceh	Swasta	PLTA	Kluet (PLTA tersebar ACEH)	87	2025	Reguler	
7	Aceh	Swasta	PLTA	Kluet (PLTA tersebar ACEH)	87	2025	Reguler	
8	Aceh	Swasta	PLTA	Wovla-5 (PLTA tersebar ACEH)	56	2025	Reguler	
9	Aceh	Swasta	PLTA	Meurebo-3 (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
10	Aceh	Swasta	PLTA	Meurebo-3 (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
11	Aceh	Swasta	PLTA	Tripa I (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
12	Aceh	Swasta	PLTA	Tripa I (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
13	Aceh	Swasta	PLTB	Biogas PT Bahari (PLTB tersebar ACEH)	3	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
14	Aceh	Swasta	PLTB	Biomassa Primanusa energi lestari (PLTB tersebar ACEH)	10	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
15	Aceh	Swasta	PLTB	Biomassa Primanusa energi lestari (PLTB tersebar ACEH)	9,8	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
16	Aceh	Swasta	PLTB	Biogas PT Primanusa Energi (PLTB tersebar ACEH)	1,5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
17	Aceh	Swasta	PLTG	Sinabang-2 #1	3	2021	Reguler	
18	Aceh	Swasta	PLTG	Sinabang-2 #2	3	2021	Reguler	
19	Aceh	Swasta	PLTM	Ketol A (PLTM tersebar ACEH)	10	2022	Reguler	
20	Aceh	Swasta	PLTM	Mangku Sosial (PLTM tersebar ACEH)	6,6	2022	Reguler	
21	Aceh	Swasta	PLTM	Teunom (PLTM tersebar ACEH)	10	2022	Reguler	
22	Aceh	Swasta	PLTM	Tembolon (Bidin 2) (PLTM tersebar ACEH)	3,1	2022	Reguler	
23	Aceh	Swasta	PLTM	Subulussalam (PLTM tersebar ACEH)	7,4	2022	Reguler	
24	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Mamas (PLTM) (PLTM tersebar ACEH)	9,6	2024	Reguler	
25	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Gurah (PLTM tersebar ACEH)	4,5	2024	Reguler	
26	Aceh	Swasta	PLTM	Lhok Pineung (PLTM tersebar ACEH)	5,1	2024	Reguler	
27	Aceh	Swasta	PLTP	Seulawah Agam (FTP2)	110	2023	Reguler	
28	Aceh	Swasta	PLTP	G. Geureudong (PLTP tersebar ACEH)	55	2023	Reguler	
29	Aceh	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTSa tersebar Sumatera)	10	2024	Reguler	
30	Aceh	Swasta	PLTU	Meulaboh (Nagan Raya) #4	200	2020	Reguler	
31	Aceh	<i>Unallocated</i>	PLTA	Jambu Aye	160	2025	Reguler	
32	Aceh	<i>Unallocated</i>	PLTA	Lawe Alas	150	2025	Reguler	
33	Babel	Swasta	PLTB	Biogas Austindo Aufwind New Energy (PLTB tersebar BABEL)	0,6	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
34	Babel	Swasta	PLTB	Biogas PT United Kingdom Indonesia	0,8	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
35	Babel	Swasta	PLTB	COD Biogas PT. Putra Bangka Mandiri (PLTB tersebar BABEL)	2	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
36	Babel	Swasta	PLTB	Biomass Sampoerna dan PJB (PLTB tersebar BABEL)	40	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
37	Babel	Swasta	PLTU	Bangka-1	100	2019	Reguler	35 GW
38	Babel	Swasta	PLTU	Bangka-1	100	2020	Reguler	
39	Bali	Swasta	PLTB	Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
40	Bali	Swasta	PLTB	Tersebar	5	2020	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
41	Bali	Swasta	PLTBm	Tersebar	0,4	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
42	Bali	Swasta	PLTM	Ayung	2,3	2024	Reguler	
43	Bali	Swasta	PLTM	Tukad Daya	8,2	2024	Reguler	
44	Bali	Swasta	PLTM	Sunduwati	2,2	2024	Reguler	
45	Bali	Swasta	PLTM	Telagawaja Ayu	1	2024	Reguler	
46	Bali	Swasta	PLTM	Tukad Balian	2,5	2024	Reguler	
47	Bali	Swasta	PLTS	Tersebar	50	2020	Reguler	
48	Bali	Swasta	PLTS	Tersebar	50	2020	Reguler	
49	Bali	Swasta	PLTSa	Tersebar	1,7	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
50	Bali	Swasta	PLTSa	Tersebar	3	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
51	Bali	Swasta	PLTSa	Tersebar	0,5	2021	Reguler	
52	Bali	<i>Unallocated</i>	PLTP	Bedugul	10	2025	Reguler	
53	Banten	Swasta	PLTB	Tersebar	35	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
54	Banten	Swasta	PLTB	Tersebar	35	2020	Reguler	
55	Banten	Swasta	PLTB	Tersebar	80	2025	Reguler	
56	Banten	Swasta	PLTM	Nagajaya	6	2021	Reguler	
57	Banten	Swasta	PLTM	Cisiih Mandiri	8	2024	Reguler	
58	Banten	Swasta	PLTM	Cibareno	3	2024	Reguler	
59	Banten	Swasta	PLTM	Cisiih Leutik	4	2024	Reguler	
60	Banten	Swasta	PLTP	Rawa Dano (FTP2)	110	2022	FTP-2	
61	Banten	Swasta	PLTP	Gunung Endut (FTP2)	40	2025	FTP-2	
62	Banten	<i>Unallocated</i>	PLTGU	Jawa-4	800	2024	Reguler	
63	Banten	<i>Unallocated</i>	PLTGU	Jawa-4	800	2025	Reguler	
64	Bengkulu	Swasta	PLTA	Air Putih	21	2018	Reguler	35 GW
65	Bengkulu	Swasta	PLTA	Kepahiyang (PLTA tersebar BENGKULU)	27	2025	Reguler	
66	Bengkulu	Swasta	PLTB	Biomassa Global Green Energy Lestari (PLTB tersebar	6	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
67	Bengkulu	Swasta	PLTM	Muara Sahung	9,9	2025	Reguler	
68	Bengkulu	Swasta	PLTM	Batu Ampar	3	2025	Reguler	
69	Bengkulu	Swasta	PLTM	Aur Gading (IPP) (PLTM tersebar Bengkulu)	2,7	2025	Reguler	
70	Bengkulu	Swasta	PLTM	Padang Guci (PLTM tersebar Bengkulu)	6	2025	Reguler	
71	Bengkulu	Swasta	PLTM	Air Tenam (PLTM tersebar Bengkulu)	7	2025	Reguler	
72	Bengkulu	Swasta	PLTM	Tunggang (PLTM tersebar Bengkulu)	10	2025	Reguler	
73	Bengkulu	Swasta	PLTM	Nakai 1 (PLTM tersebar Bengkulu)	3	2025	Reguler	
74	Bengkulu	Swasta	PLTM	Nakai 2 (PLTM tersebar Bengkulu)	4	2025	Reguler	
75	Bengkulu	Swasta	PLTM	Ketaun 1 (IPP) (PLTM tersebar Bengkulu)	4,2	2025	Reguler	
76	Bengkulu	Swasta	PLTM	Ketaun 2 (IPP) (PLTM tersebar Bengkulu)	2	2025	Reguler	
77	Bengkulu	Swasta	PLTM	Puguk (PLTM tersebar Bengkulu)	5,3	2025	Reguler	
78	Bengkulu	Swasta	PLTP	Kepahiyang (PLTP tersebar BENGKULU)	110	2025	Reguler	
79	Bengkulu	Swasta	PLTP	Gn.Dingin (PLTP tersebar BENGKULU)	55	2025	Reguler	
80	Bengkulu	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTSa tersebar Sumatera)	10	2020	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
81	Bengkulu	<i>Unallocated</i>	PLTA	Musi Kota Agung (PLTA tersebar BENGKULU)	27,50	2022	Reguler	
82	Yogyakarta	Swasta	PLTB	Tersebar	10	2025	Reguler	
83	Yogyakarta	Swasta	PLTM	Semawung	0,6	2020	Reguler	
84	Gorontalo	Swasta	PLTBM	Biomass Gorontalo Tersebar	6	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
85	Gorontalo	Swasta	PLTBM	Biomass Gorontalo Tersebar	6	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
86	Gorontalo	Swasta	PLTM	Iva	2	2019	Reguler	35 GW
87	Gorontalo	Swasta	PLTM	Bone	7,4	2024	Reguler	
88	Gorontalo	Swasta	PLTP	Suwawa	20	2024	Reguler	
89	Gorontalo	Swasta	PLTP	Pentadio	5	2025	Reguler	
90	Gorontalo	Swasta	PLTS	Gorontalo Tersebar	5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
91	Gorontalo	Swasta	PLTS	Gorontalo Tersebar	10	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
92	Gorontalo	Swasta	PLTS	Gorontalo Tersebar	10	2021	Reguler	
93	Gorontalo	Swasta	PLTU	Sulbagut 3	50	2019	Reguler	35 GW
94	Gorontalo	Swasta	PLTU	Sulbagut 3	50	2020	Reguler	
95	Jambi	Swasta	PLTA	Merangin #1	175	2022	Reguler	
96	Jambi	Swasta	PLTA	Merangin #2	175	2023	Reguler	
97	Jambi	Swasta	PLTB	Biomassa PT Rimba Palma Sejahtera	15	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
98	Jambi	Swasta	PLTP	Graho Nyabu (PLTP tersebar Jambi)	110	2025	Reguler	
99	Jambi	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTSa tersebar Sumatera)	10	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
100	Jambi	Swasta	PLTU	Jambi	600	2019	Reguler	35 GW
101	Jambi	Swasta	PLTU	Jambi	600	2019	Reguler	35 GW
102	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	80	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
103	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	80	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
104	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	90	2020	Reguler	
105	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	160	2025	Reguler	
106	Jabar	Swasta	PLTBm	Tersebar	11,5	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
107	Jabar	Swasta	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 4	450	2018	Reguler	35 GW
108	Jabar	Swasta	PLTM	Kertamukti	6,3	2020	Reguler	
109	Jabar	Swasta	PLTM	Pesantren-1	1,8	2020	Reguler	
110	Jabar	Swasta	PLTM	Sukamaju	7,5	2021	Reguler	
111	Jabar	Swasta	PLTM	Kanzy-5	5	2021	Reguler	
112	Jabar	Swasta	PLTM	Cilayu Kulon	5,2	2021	Reguler	
113	Jabar	Swasta	PLTM	Ciherang	1,5	2021	Reguler	
114	Jabar	Swasta	PLTM	Cibuni Mandiri	2	2021	Reguler	
115	Jabar	Swasta	PLTM	Cibuni	3,2	2021	Reguler	
116	Jabar	Swasta	PLTM	Cibatarua Panyairan	8,2	2023	Reguler	
117	Jabar	Swasta	PLTM	Toblong	6	2023	Reguler	
118	Jabar	Swasta	PLTM	Jatisari	5	2024	Reguler	
119	Jabar	Swasta	PLTM	Cikaengan Najaten	7,2	2024	Reguler	
120	Jabar	Swasta	PLTM	Cirompang Mekarmukti	4	2024	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
121	Jabar	Swasta	PLTM	Cileat	5,2	2024	Reguler	
122	Jabar	Swasta	PLTM	Cimaja	3	2024	Reguler	
123	Jabar	Swasta	PLTM	Cikawung Bawah	2,5	2025	Reguler	
124	Jabar	Swasta	PLTM	Cikawung Atas	5	2025	Reguler	
125	Jabar	Swasta	PLTP	Tangkuban Perahu 1 (FTP2)	55	2020	FTP-2	
126	Jabar	Swasta	PLTP	Karaha Bodas (FTP2)	55	2020	FTP-2	
127	Jabar	Swasta	PLTP	Cisolok-Cisukarame (FTP2)	50	2020	FTP-2	
128	Jabar	Swasta	PLTP	Wayang Windu 3 (FTP2)	110	2020	FTP-2	
129	Jabar	Swasta	PLTP	Karaha Bodas (FTP2)	55	2021	FTP-2	
130	Jabar	Swasta	PLTP	Wayang Windu 4 (FTP2)	110	2021	FTP-2	
131	Jabar	Swasta	PLTP	Tampomas (FTP2)	45	2022	FTP-2	
132	Jabar	Swasta	PLTP	Cibuni (FTP2)	10	2024	FTP-2	
133	Jabar	Swasta	PLTP	Tangkuban Perahu 2 (FTP2)	30	2025	FTP-2	
134	Jabar	Swasta	PLTP	Tangkuban Perahu 2 (FTP2)	30	2025	FTP-2	
135	Jabar	Swasta	PLTP	Gunung Ciremai (FTP2)	55	2025	FTP-2	
136	Jabar	Swasta	PLTP	Gunung Ciremai (FTP2)	55	2025	FTP-2	
137	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	14	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
138	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
139	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
140	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
141	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	16	2021	Reguler	
142	Jabar	Unallocated	PLTA	Cimandiri-3	119	2025	Reguler	
143	Jabar	Unallocated	PLTA	Cimandiri-3	119	2025	Reguler	
144	Jabar	Unallocated	PLTA	Cikaso-3	53	2025	Reguler	
145	Jabar	Unallocated	PLTA	Cipasang	200	2025	Reguler	
146	Jabar	Unallocated	PLTA	Cipasang	200	2025	Reguler	
147	Jabar	Unallocated	PLTA	Cibuni-3	172	2025	Reguler	
148	Jabar	Unallocated	PLTA	Cibuni-4	105	2025	Reguler	
149	Jabar	Unallocated	PLTGU	Jawa-7	800	2024	Reguler	
150	Jabar	Unallocated	PLTGU	Jawa-7	800	2025	Reguler	
151	Jabar	Unallocated	PLTP	Gunung Galunggung	110	2024	Reguler	
152	Jabar	Unallocated	PLTP	Gede Pangrango	85	2025	Reguler	
153	Jateng	Swasta	PLTM	Karekan	8	2020	Reguler	
154	Jateng	Swasta	PLTM	Danawarih	0,6	2020	Reguler	
155	Jateng	Swasta	PLTM	Kalipelus	0,5	2020	Reguler	
156	Jateng	Swasta	PLTM	Pageruyung-1	4,4	2022	Reguler	
157	Jateng	Swasta	PLTM	Kaliwadas	0,4	2023	Reguler	
158	Jateng	Swasta	PLTM	Preng-1	1,8	2024	Reguler	
159	Jateng	Swasta	PLTM	Preng-2	4,5	2024	Reguler	
160	Jateng	Swasta	PLTM	Tulis	9	2024	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
161	Jateng	Swasta	PLTM	Harjosari	9,9	2024	Reguler	
162	Jateng	Swasta	PLTM	Lambur	8	2024	Reguler	
163	Jateng	Swasta	PLTM	Prukut Sambirata	1,5	2024	Reguler	
164	Jateng	Swasta	PLTM	Dadapayam	3	2024	Reguler	
165	Jateng	Swasta	PLTM	Binangun	3,8	2024	Reguler	
166	Jateng	Swasta	PLTM	Jimat	0,5	2024	Reguler	
167	Jateng	Swasta	PLTM	Pageruyung (Damar)	2,1	2024	Reguler	
168	Jateng	Swasta	PLTP	Ungaran (FTP2)	55	2023	FTP-2	
169	Jateng	Swasta	PLTP	Dieng (FTP2)	60	2023	FTP-2	
170	Jateng	Swasta	PLTP	Baturaden (FTP2)	110	2023	FTP-2	
171	Jateng	Swasta	PLTP	Guci (FTP2)	55	2023	FTP-2	
172	Jateng	Swasta	PLTP	Umbul Telumoyo (FTP2)	55	2023	FTP-2	
173	Jateng	Swasta	PLTP	Baturaden (FTP2)	110	2024	FTP-2	
174	Jateng	Swasta	PLTSa	Tersebar	7	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
175	Jateng	Swasta	PLTSa	Tersebar	16	2023	Reguler	
176	Jateng	Unallocated	PLTA	Maung	350	2024	Reguler	
177	Jateng	Unallocated	PLTA	Rawalo-2	10,3	2025	Reguler	
178	Jateng	Unallocated	PLTGU	Jawa-6	800	2024	Reguler	
179	Jateng	Unallocated	PLTGU	Jawa-6	800	2025	Reguler	
180	Jateng	Unallocated	PLTP	Gunung Lawu	55	2024	Reguler	
181	Jateng	Unallocated	PLTP	Gunung Lawu	55	2024	Reguler	
182	Jateng	Unallocated	PLTP	Gunung Lawu	55	2024	Reguler	
183	Jateng	Unallocated	PLTU	Jawa-10	660	2021	Reguler	
184	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2023	Reguler	
185	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2023	Reguler	
186	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2024	Reguler	
187	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2024	Reguler	
188	Jatim	Swasta	PLTGU	Jawa-3	500	2018	Reguler	35 GW
189	Jatim	Swasta	PLTGU	Jawa-3	300	2019	Reguler	35 GW
190	Jatim	Swasta	PLTM	Lodagung	1,3	2020	Reguler	
191	Jatim	Swasta	PLTM	Kanzy-1	2,4	2023	Reguler	
192	Jatim	Swasta	PLTM	Jompo 1 (Jompo Atas)	2,1	2024	Reguler	
193	Jatim	Swasta	PLTM	Jompo 2 (Jompo Bawah)	3,2	2024	Reguler	
194	Jatim	Swasta	PLTM	Kali Tengah (Sungai Tengah)	1,4	2024	Reguler	
195	Jatim	Swasta	PLTM	Ketajek	3,3	2024	Reguler	
196	Jatim	Swasta	PLTM	Zeelandia	2,2	2024	Reguler	
197	Jatim	Swasta	PLTM	Lodoyo	9,5	2025	Reguler	
198	Jatim	Swasta	PLTP	Ijen (FTP2)	55	2020	FTP-2	
199	Jatim	Swasta	PLTP	Ijen (FTP2)	55	2021	FTP-2	
200	Jatim	Swasta	PLTP	Wilis/Ngebel (FTP2)	55	2021	FTP-2	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
201	Jatim	Swasta	PLTP	Iyang Argopuro (FTP2)	55	2023	FTP-2	
202	Jatim	Swasta	PLTP	Wilis/Ngebel (FTP2)	55	2024	FTP-2	
203	Jatim	Swasta	PLTP	Wilis/Ngebel (FTP2)	55	2024	FTP-2	
204	Jatim	Swasta	PLTSa	Tersebar	9	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
205	Jatim	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
206	Jatim	Swasta	PLTSa	Tersebar	36	2022	Reguler	
207	Jatim	Unallocated	PLTA	Karangates #4-5	100	2022	Reguler	
208	Jatim	Unallocated	PLTA	Kesamben	37	2022	Reguler	
209	Jatim	Unallocated	PLTGU	Jawa-5	800	2024	Reguler	
210	Jatim	Unallocated	PLTGU	Jawa-5	800	2025	Reguler	
211	Jatim	Unallocated	PLTMG	Kangean	1	2020	Reguler	
212	Jatim	Unallocated	PLTMG	Bawean	3	2021	Reguler	
213	Jatim	Unallocated	PLTMG	Sapudi	1	2023	Reguler	
214	Jatim	Unallocated	PLTP	Arjuno Welirang	185	2024	Reguler	
215	Jatim	Unallocated	PLTP	Songgoriti	35	2025	Reguler	
216	Jatim	Unallocated	PLTP	Gunung Wilis	10	2025	Reguler	
217	Jatim	Unallocated	PLTP	Gunung Wilis	10	2025	Reguler	
218	Jatim	Unallocated	PLTP	Gunung Pandan	60	2025	Reguler	
219	Jatim	Unallocated	PLTU/GU	Madura	400	2022	Reguler	
220	Jatim	Unallocated	PS	Grindulu	250	2025	Reguler	
221	Jatim	Unallocated	PS	Grindulu	250	2025	Reguler	
222	Jatim	Unallocated	PS	Grindulu	250	2025	Reguler	
223	Jatim	Unallocated	PS	Grindulu	250	2025	Reguler	
224	Kalbar	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Kalbar	20	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
225	Kalbar	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Kalbar	5	2025	Reguler	
226	Kalbar	Swasta	PLTSa	Waste PP Pontianak	5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
227	Kalbar	Swasta	PLTSa	Waste PP Ketapang	2	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
228	Kalbar	Swasta	PLTSa	Waste PP Pontianak	2	2023	Reguler	
229	Kalbar	Swasta	PLTSa	Waste PP Ketapang	2	2024	Reguler	
230	Kalbar	Swasta	PLTU	Kalbar 2	200	2021	Reguler	
231	Kalbar	Swasta	PLTU	Kalbar 3	200	2022	Reguler	
232	Kalbar	Unallocated	PLTGU	Kalbar Peaker 2	160	2023	Reguler	
233	Kalbar	Unallocated	PLTGU	Kalbar Peaker 2	90	2024	Reguler	
234	Kalbar	Unallocated	PLTU	Kalbar 4	200	2025	Reguler	
235	Kalsel	Swasta	PLTBM	Biomass Kalsel Tersebar	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
236	Kalsel	Swasta	PLTBM	Biomass Kalsel Tersebar	4,4	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
237	Kalsel	Swasta	PLTSa	Waste PP Palangkaraya	2	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
238	Kalsel	Swasta	PLTSa	Waste PP Banjarmasin	2	2023	Reguler	
239	Kalsel	Swasta	PLTSa	Waste PP Palangkaraya	2	2024	Reguler	
240	Kalsel	Unallocated	PLTGU	Kalsel 1 (Load Follower)	200	2024	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
241	Kaltara	Swasta	PLTA	Kayan 1	110	2024	Reguler	
242	Kaltara	Swasta	PLTA	Kayan 1	110	2025	Reguler	
243	Kalteng	Swasta	PLTBM	Biomass Kalteng Tersebar	10	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
244	Kalteng	Swasta	PLTSa	Waste PP Banjarmasin	2	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
245	Kaltim	Swasta	PLTA	Tabang	175	2024	Reguler	
246	Kaltim	Swasta	PLTA	Tabang	175	2025	Reguler	
247	Kaltim	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Kaltim	12,1	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
248	Kaltim	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Kaltim	9,5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
249	Kaltim	Swasta	PLTSa	Waste PP Balikpapan	4	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
250	Kaltim	Swasta	PLTSa	Waste PP Samarinda	2	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
251	Kaltim	Swasta	PLTSa	Waste PP Balikpapan	4	2023	Reguler	
252	Kaltim	Swasta	PLTSa	Waste PP Samarinda	2	2023	Reguler	
253	Kaltim	Swasta	PLTSa	Waste PP Balikpapan	4	2025	Reguler	
254	Kaltim	Swasta	PLTSa	Waste PP Samarinda	2	2025	Reguler	
255	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim 3	200	2020	Reguler	
256	Kaltim	Swasta	PLTU	Kaltim 6	200	2020	Reguler	
257	Kaltim	<i>Unallocated</i>	PLTGU	Kaltim 1 (Load Follower)	200	2022	Reguler	
258	Kaltim	<i>Unallocated</i>	PLTU	Kaltim 5	200	2023	Reguler	
259	Kepri	Swasta	PLTB	Biomasssa Prima Gasifikasi Indonesia (PLTB tersebar KEPRI)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
260	Kepri	<i>Unallocated</i>	PLTG	Dabo Singkep	20	2021	Reguler	
261	Kepri	<i>Unallocated</i>	PLTG	Natuna-3	25	2021	Reguler	
262	Kepri	<i>Unallocated</i>	PLTG	Taniung Batu-3 #1	15	2022	Reguler	
263	Kepri	<i>Unallocated</i>	PLTG	Taniung Batu-3 #2	15	2023	Reguler	
264	Kepri	<i>Unallocated</i>	PLTU	Taniung Balai Karimun-1	40	2020	Reguler	
265	Lampung	Swasta	PLTM	Way Simpang Kanan (PLTM tersebar Lampung)	4,6	2022	Reguler	
266	Lampung	Swasta	PLTM	Besay (PLTM tersebar Lampung)	9,2	2022	Reguler	
267	Lampung	Swasta	PLTM	Sukarame (PLTM tersebar Lampung)	8	2022	Reguler	
268	Lampung	Swasta	PLTM	Way Pintau (PLTM tersebar Lampung)	3,2	2025	Reguler	
269	Lampung	Swasta	PLTSa	Sampah Zero Waste (PLTSa tersebar Sumatera)	5	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
270	Lampung	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTSa tersebar Sumatera)	10	2021	Reguler	
271	Lampung	<i>Unallocated</i>	PLTA	Besai-2 (PLTA tersebar Lampung)	27	2022	Reguler	
272	Lampung	<i>Unallocated</i>	PLTGU	Sumatera-2	400	2025	Reguler	
273	Maluku	Swasta	PLTB	Ambon	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
274	Maluku	Swasta	PLTB	Ambon	5	2020	Reguler	
275	Maluku	Swasta	PLTB	Ambon	5	2023	Reguler	
276	Maluku	Swasta	PLTB	Ambon	5	2025	Reguler	
277	Maluku	Swasta	PLTBM	Biomass Seram Tersebar	6	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
278	Maluku	Swasta	PLTS	Ambon Tersebar	5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
279	Maluku	Swasta	PLTS	Seram Tersebar	5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
280	Malut	Swasta	PLTP	Telaga Ranu	10	2024	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
281	Malut	Swasta	PLTP	Gunung Hamiding	10	2024	Reguler	
282	Malut	Swasta	PLTS	Maluku Utara Tersebar	5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
283	Malut	Swasta	PLTS	Maluku Utara Tersebar	10	2024	Reguler	
284	Malut	Unallocated	PLTMG	Halmahera (Load Follower)	40	2021	Reguler	
285	Malut	Unallocated	PLTU	Tidore	25	2022	Reguler	
286	Malut	Unallocated	PLTU	Tidore	25	2023	Reguler	
287	NTB	Swasta	PLTB	Sumbawa	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
288	NTB	Swasta	PLTB	Sumbawa	5	2021	Reguler	
289	NTB	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Sumbawa	1	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
290	NTB	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Lombok	5	2021	Reguler	
291	NTB	Swasta	PLTM	Sedau	1,3	2018	Reguler	35 GW
292	NTB	Swasta	PLTM	Kokok Babag	2,3	2019	Reguler	35 GW
293	NTB	Swasta	PLTM	Brang Rea 2	3,8	2019	Reguler	35 GW
294	NTB	Swasta	PLTM	Brang Rea 1	2,5	2019	Reguler	35 GW
295	NTB	Swasta	PLTM	Bintang Bano	8,8	2019	Reguler	35 GW
296	NTB	Swasta	PLTP	Hu'u (FTP2)	10	2025	FTP-2	
297	NTB	Swasta	PLTP	Hu'u (FTP2)	10	2025	FTP-2	
298	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	20	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
299	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
300	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
301	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
302	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	50	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
303	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	5	2025	Reguler	
304	NTB	Swasta	PLTS	NTB Tersebar	5	2025	Reguler	
305	NTB	Swasta	PLTSa	Waste PP NTB	1	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
306	NTB	Swasta	PLTSa	Waste PP NTB	1	2020	Reguler	
307	NTB	Unallocated	PLTGU	Lombok 1 (Load Follower)	100	2023	Reguler	
308	NTB	Unallocated	PLTU	Sumbawa 2	50	2021	Reguler	
309	NTB	Unallocated	PLTU	Sumbawa 2	50	2022	Reguler	
310	NTB	Unallocated	PLTU	Lombok 3	50	2024	Reguler	
311	NTB	Unallocated	PLTU	Lombok 3	50	2025	Reguler	
312	NTT	Swasta	PLTB	Kupang	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
313	NTT	Swasta	PLTB	Kupang	5	2021	Reguler	
314	NTT	Swasta	PLTB	Kupang	5	2023	Reguler	
315	NTT	Swasta	PLTB	Kupang	5	2023	Reguler	
316	NTT	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Sumba Timur	4	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
317	NTT	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Sumba Timur	4	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
318	NTT	Swasta	PLTBM	Biomass Tersebar Sumba Barat	5	2024	Reguler	
319	NTT	Swasta	PLTM	Harunda	1,6	2019	Reguler	35 GW
320	NTT	Swasta	PLTP	Oka Ile Ange (FTP 2)	10	2024	FTP-2	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
321	NTT	Swasta	PLTP	Lesugolo	5	2024	Reguler	
322	NTT	Swasta	PLTS	NTT Tersebar	10	2020	Reguler	
323	NTT	Swasta	PLTS	NTT Tersebar	10	2023	Reguler	
324	NTT	Swasta	PLTSa	Waste PP NTT	1	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
325	NTT	Unallocated	PLTMG	Timor 1 (Load Follower)	40	2022	Reguler	
326	NTT	Unallocated	PLTU	Timor 2	50	2023	Reguler	
327	NTT	Unallocated	PLTU	Timor 2	50	2024	Reguler	
328	Papua	Swasta	PLTA	Sentani	20	2025	Reguler	
329	Papua	Swasta	PLTBM	Merauke	10	2018	Reguler	35 GW
330	Papua	Swasta	PLTS	Papua Tersebar	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
331	Papua	Swasta	PLTS	Papua Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
332	Papua	Swasta	PLTS	Papua Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
333	Papua	Swasta	PLTS	Papua Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
334	Papua	Swasta	PLTS	Papua Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
335	Papua	Swasta	PLTSa	Waste PP Javapura	1	2024	Reguler	
336	Papua	Unallocated	PLTMG	Nabire 3	10	2024	Reguler	
337	Papua	Unallocated	PLTMG	Javapura 3	50	2025	Reguler	
338	Pabar	Swasta	PLTS	Papua Barat Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
339	Pabar	Swasta	PLTS	Papua Barat Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
340	Pabar	Unallocated	PLTMG	Manokwari 3	20	2022	Reguler	
341	Pabar	Unallocated	PLTMG	Sorong (Load Follower)	50	2022	Reguler	
342	Riau	Swasta	PLTB	Biomassa Prima Gasifikasi Indonesia (PLTB tersebar RIAU)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
343	Riau	Swasta	PLTB	Biogas Karva Mas Energi (PLTB tersebar RIAU)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
344	Riau	Swasta	PLTB	Biogas Karva Mas Energi (PLTB tersebar RIAU)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
345	Riau	Swasta	PLTB	Biogas POME (PLTB tersebar RIAU)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
346	Riau	Swasta	PLTB	Biomassa PT Riau Green Energy Rokan Hulu (PLTB tersebar	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
347	Riau	Swasta	PLTB	Biogas POME (PLTB tersebar RIAU)	2	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
348	Riau	Swasta	PLTGU	Dumai	160	2022	Reguler	
349	Riau	Swasta	PLTGU	Dumai	90	2022	Reguler	
350	Riau	Swasta	PLTSa	Sampah PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) (PLTSa	10	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
351	Riau	Swasta	PLTU	Riau-1 *	300	2019	Reguler	35 GW
352	Riau	Swasta	PLTU	Riau-1 *	300	2019	Reguler	35 GW
353	Sulbar	Swasta	PLTA	Tabulahan	10	2022	Reguler	
354	Sulbar	Swasta	PLTA	Masupu	18	2022	Reguler	
355	Sulbar	Swasta	PLTA	Tabulahan	10	2023	Reguler	
356	Sulbar	Swasta	PLTA	Masupu	18	2023	Reguler	
357	Sulbar	Swasta	PLTA	Tinauka	150	2024	Reguler	
358	Sulbar	Swasta	PLTA	Karama Peaking (Unsolicited)	190	2025	Reguler	
359	Sulbar	Swasta	PLTA	Tinauka	150	2025	Reguler	
360	Sulbar	Swasta	PLTBM	Biomass Sulbar Tersebar	5	2020	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
361	Sulsel	Swasta	PLTA	Salu Uro	47,50	2020	Reguler	
362	Sulsel	Swasta	PLTA	Salu Uro	47,50	2021	Reguler	
363	Sulsel	Swasta	PLTA	Kalaena 1	27	2021	Reguler	
364	Sulsel	Swasta	PLTA	Kalaena 1	27	2022	Reguler	
365	Sulsel	Swasta	PLTA	Tumbuan 1	150	2023	Reguler	
366	Sulsel	Swasta	PLTA	Seko 1	160	2023	Reguler	
367	Sulsel	Swasta	PLTA	Buttu Batu	100	2023	Reguler	
368	Sulsel	Swasta	PLTA	Seko 1	320	2024	Reguler	
369	Sulsel	Swasta	PLTA	Makale	45	2024	Reguler	
370	Sulsel	Swasta	PLTA	Buttu Batu	100	2024	Reguler	
371	Sulsel	Swasta	PLTA	Tumbuan 2	75	2025	Reguler	
372	Sulsel	Swasta	PLTA	Tumbuan 1	150	2025	Reguler	
373	Sulsel	Swasta	PLTA	Seko 2	90	2025	Reguler	
374	Sulsel	Swasta	PLTB	Jeneponto	60	2019	Reguler	35 GW
375	Sulsel	Swasta	PLTB	Sidrap	40	2020	Reguler	
376	Sulsel	Swasta	PLTB	Jeneponto	60	2023	Reguler	
377	Sulsel	Swasta	PLTBM	Biomass Sulsel Tersebar	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
378	Sulsel	Swasta	PLTM	Bantaeng 1	4,2	2017	Reguler	35 GW
379	Sulsel	Swasta	PLTM	Bungin III	5	2017	Reguler	35 GW
380	Sulsel	Swasta	PLTM	Datara	7	2018	Reguler	35 GW
381	Sulsel	Swasta	PLTM	Belaien	8,3	2018	Reguler	35 GW
382	Sulsel	Swasta	PLTM	Mallawa	5	2018	Reguler	35 GW
383	Sulsel	Swasta	PLTM	Kondongan	3,5	2019	Reguler	35 GW
384	Sulsel	Swasta	PLTM	Pasui	1,9	2019	Reguler	35 GW
385	Sulsel	Swasta	PLTM	Baliase	9	2019	Reguler	35 GW
386	Sulsel	Swasta	PLTM	Malua	5	2019	Reguler	35 GW
387	Sulsel	Swasta	PLTM	Pasui 2	6	2019	Reguler	35 GW
388	Sulsel	Swasta	PLTM	Pongbatik	3	2019	Reguler	35 GW
389	Sulsel	Swasta	PLTM	Madong	10	2020	Reguler	
390	Sulsel	Swasta	PLTM	Bontotene	1,7	2022	Reguler	
391	Sulsel	Swasta	PLTM	Kahaya	4	2024	Reguler	
392	Sulsel	Swasta	PLTM	Rongkong	8,1	2024	Reguler	
393	Sulsel	Swasta	PLTM	Eremerasa	1,2	2024	Reguler	
394	Sulsel	Swasta	PLTSa	Waste PP Makassar	1	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
395	Sulsel	<i>Unallocated</i>	PLTGU	Sulbagsel 1 (Load Follower)	450	2024	Reguler	
396	Sulteng	Swasta	PLTA	Poso 1	35	2020	Reguler	
397	Sulteng	Swasta	PLTA	Poso 1	35	2020	Reguler	
398	Sulteng	Swasta	PLTA	Laa	80	2024	Reguler	
399	Sulteng	Swasta	PLTA	Laa	80	2025	Reguler	
400	Sulteng	Swasta	PLTM	Koro Kabalo	2,5	2019	Reguler	35 GW

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
401	Sulteng	Swasta	PLTM	Bambalo 2	1,8	2019	Reguler	35 GW
402	Sulteng	Swasta	PLTM	Pono	6	2019	Reguler	35 GW
403	Sulteng	Swasta	PLTM	Bongkaso	1,4	2022	Reguler	
404	Sulteng	Swasta	PLTM	Lobu	5	2024	Reguler	
405	Sulteng	Swasta	PLTM	Banasu	9	2024	Reguler	
406	Sulteng	Swasta	PLTP	Marana (FTP 2)	20	2023	FTP-2	
407	Sulteng	Swasta	PLTP	Bora Pulu (FTP 2)	40	2024	FTP-2	
408	Sulteng	Swasta	PLTS	Sulteng Tersebar	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
409	Sulteng	Swasta	PLTS	Sulteng Tersebar	20	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
410	Sulteng	Swasta	PLTSa	Waste PP Palu	1	2023	Reguler	
411	Sultra	Swasta	PLTA	Lasolo	73	2023	Reguler	
412	Sultra	Swasta	PLTA	Lasolo	73	2023	Reguler	
413	Sultra	Swasta	PLTS	Bau-Bau Tersebar	5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
414	Sultra	Swasta	PLTS	Wangi Wangi Tersebar	2	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
415	Sultra	Swasta	PLTS	Bau-Bau Tersebar	5	2020	Reguler	
416	Sultra	Swasta	PLTS	Wangi Wangi Tersebar	2	2020	Reguler	
417	Sultra	Swasta	PLTS	Sultra Tersebar	10	2022	Reguler	
418	Sultra	Swasta	PLTS	Bau-Bau Tersebar	5	2023	Reguler	
419	Sultra	Swasta	PLTS	Wangi Wangi Tersebar	2	2023	Reguler	
420	Sultra	Swasta	PLTU	Bau-Bau	25	2019	Reguler	35 GW
421	Sultra	Swasta	PLTU	Bau-Bau	25	2019	Reguler	35 GW
422	Sultra	Unallocated	PLTP	Lainea	20	2025	Reguler	
423	Sultra	Unallocated	PLTU	Bau-Bau	25	2022	Reguler	
424	Sultra	Unallocated	PLTU	Bau-Bau	25	2023	Reguler	
425	Sulut	Swasta	PLTA	Poigar 2	30	2021	Reguler	
426	Sulut	Swasta	PLTM	Duminanga	3,5	2019	Reguler	35 GW
427	Sulut	Swasta	PLTM	Pidung	2	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
428	Sulut	Swasta	PLTM	Ranowangko	2,2	2019	Reguler	35 GW
429	Sulut	Swasta	PLTM	Tincep 2	1,1	2021	Reguler	
430	Sulut	Swasta	PLTM	Tincep 3	2,2	2021	Reguler	
431	Sulut	Swasta	PLTM	Kilotiga	0,6	2024	Reguler	
432	Sulut	Swasta	PLTM	Tincep 1	0,4	2024	Reguler	
433	Sulut	Swasta	PLTM	Tincep 4	0,4	2024	Reguler	
434	Sulut	Swasta	PLTM	Totabuan 1	5	2024	Reguler	
435	Sulut	Swasta	PLTS	Sulut Tersebar	10	2021	Reguler	
436	Sulut	Swasta	PLTU	Sulut 3	50	2020	Reguler	
437	Sulut	Unallocated	PLTGU	Sulbagut 1 (Load Follower)	200	2022	Reguler	
438	Sulut	Unallocated	PLTU	Sulbagut 2	100	2023	Reguler	
439	Sulut	Unallocated	PLTU	Sulbagut 2	100	2024	Reguler	
440	Sumbar	Swasta	PLTM	Batang Anai-1	3	2019	Reguler	35 GW

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
441	Sumbar	Swasta	PLTM	Muara Sako	3	2019	Reguler	35 GW
442	Sumbar	Swasta	PLTM	Batang Sumpur	7,6	2019	Reguler	35 GW
443	Sumbar	Swasta	PLTM	Sikarbau	2	2019	Reguler	35 GW
444	Sumbar	Swasta	PLTM	Tuik	6,3	2019	Reguler	35 GW
445	Sumbar	Swasta	PLTM	Siamang Bunyi	1,7	2019	Reguler	35 GW
446	Sumbar	Swasta	PLTM	Sangir Hulu	10	2019	Reguler	35 GW
447	Sumbar	Swasta	PLTM	Pinti Kayu (PLTM tersebar SUMBAR)	10	2022	Reguler	
448	Sumbar	Swasta	PLTM	Gumanti I (PLTM tersebar SUMBAR)	4	2022	Reguler	
449	Sumbar	Swasta	PLTM	Sianok Duku (PLTM tersebar SUMBAR)	6,6	2022	Reguler	
450	Sumbar	Swasta	PLTM	Tongar	6	2023	Reguler	
451	Sumbar	Swasta	PLTM	Bukit Cubadak (PLTM tersebar SUMBAR)	9,2	2024	Reguler	
452	Sumbar	Swasta	PLTM	Kerambil (PLTM tersebar SUMBAR)	1,4	2024	Reguler	
453	Sumbar	Swasta	PLTM	Batang Patimah (PLTM tersebar SUMBAR)	2,8	2024	Reguler	
454	Sumbar	Swasta	PLTM	Bukit Sileh (PLTM tersebar SUMBAR)	0,7	2024	Reguler	
455	Sumbar	Swasta	PLTM	Pasinggrahan (PLTM tersebar SUMBAR)	0,5	2024	Reguler	
456	Sumbar	Swasta	PLTM	Laruang Gosan (PLTM tersebar SUMBAR)	4	2024	Reguler	
457	Sumbar	Swasta	PLTM	Rabi Jonggor (PLTM tersebar SUMBAR)	4,5	2024	Reguler	
458	Sumbar	Swasta	PLTM	Tras (PLTM tersebar SUMBAR)	1,6	2024	Reguler	
459	Sumbar	Swasta	PLTP	Gn.Tandikat-Singgalang (PLTP tersebar SUMBAR)	55	2023	Reguler	
460	Sumbar	Swasta	PLTP	G.Talang (PLTP tersebar Sumbar)	20	2025	Reguler	
461	Sumbar	Swasta	PLTP	Sumani (PLTP tersebar SUMBAR)	55	2025	Reguler	
462	Sumbar	Swasta	PLTP	Simisioh (PLTP tersebar SUMBAR)	20	2025	Reguler	
463	Sumbar	Swasta	PLTP	Talamau (PLTP tersebar SUMBAR)	55	2025	Reguler	
464	Sumbar	Swasta	PLTSa	Sampah Kota PT Godang Tua Java KSO PT OVI Energi (PLTSa	10	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
465	Sumsel	Swasta	PLTB	Biogas PT. Sampoerna Agri (PKS Selapan Java) (PLTB tersebar	2	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
466	Sumsel	Swasta	PLTB	Biogas PT. Sampoerna Agri (PKS Permata Bunda) (PLTB	2	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
467	Sumsel	Swasta	PLTB	Biogas PT Megah Hijau Lestari (PLTB tersebar SUMSEL)	2,5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
468	Sumsel	Swasta	PLTM	Babatan (PLTM tersebar SUMSEL)	4,9	2021	Reguler	
469	Sumsel	Swasta	PLTM	Sungai Air Dikit (PLTM tersebar SUMSEL)	6	2022	Reguler	
470	Sumsel	Swasta	PLTM	Karvanyata (PLTM tersebar SUMSEL)	4	2022	Reguler	
471	Sumsel	Swasta	PLTM	Telanai Banding Agung (PLTM tersebar SUMSEL)	6	2024	Reguler	
472	Sumsel	Swasta	PLTM	Selabung (PLTM tersebar SUMSEL)	4,5	2025	Reguler	
473	Sumsel	Swasta	PLTP	Way Selabung (PLTP tersebar SUMSEL)	10	2024	Reguler	
474	Sumsel	Swasta	PLTP	Tanjung Sakti (PLTP tersebar SUMSEL)	55	2025	Reguler	
475	Sumsel	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTSa tersebar Sumatera)	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
476	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel-7 #1	150	2018	Reguler	35 GW
477	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel-7 #2	150	2018	Reguler	35 GW
478	Sumsel	Swasta	PLTU	Sumsel-6 #2	300	2020	Reguler	
479	Sumsel	<i>Unallocated</i>	PLTGU	Sumatera-1	400	2024	Reguler	
480	Sumut	Swasta	PLTA	Sidikalang-1	15	2019	Reguler	35 GW

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
481	Sumut	Swasta	PLTA	Kerjasama Jepang	20	2025	Reguler	
482	Sumut	Swasta	PLTA	Siborpa (PLTA tersebar SUMUT)	120	2025	Reguler	
483	Sumut	Swasta	PLTA	Pahae Julu (PLTA tersebar SUMUT)	9	2025	Reguler	
484	Sumut	Swasta	PLTA	Pahae Julu (PLTA tersebar SUMUT)	9	2025	Reguler	
485	Sumut	Swasta	PLTA	Aek Kualu (PLTA tersebar SUMUT)	27	2025	Reguler	
486	Sumut	Swasta	PLTA	Upper Sibundong (PLTA tersebar Sumut)	25	2025	Reguler	
487	Sumut	Swasta	PLTA	Aek Kuala (PLTA tersebar SUMUT)	17	2025	Reguler	
488	Sumut	Swasta	PLTA	Kerjasama Jepang	20	2025	Reguler	
489	Sumut	Swasta	PLTB	Biomassa PTPN III (PLTB tersebar SUMUT)	3,5	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
490	Sumut	Swasta	PLTB	Biomassa PT Growth Asia (eksisting) (PLTB tersebar SUMUT)	20	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
491	Sumut	Swasta	PLTB	Biomassa PT Growth Asia (eksisting) (PLTB tersebar SUMUT)	20	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
492	Sumut	Swasta	PLTB	Biogas PT Siringo-ringo (PLTB tersebar SUMUT)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
493	Sumut	Swasta	PLTB	Biogas POME (PLTB tersebar SUMUT)	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
494	Sumut	Swasta	PLTB	Biogas POME (PLTB tersebar SUMUT)	3	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
495	Sumut	Swasta	PLTB	Biogas PT Pratama Wiyava Energi (PLTB tersebar SUMUT)	2	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
496	Sumut	Swasta	PLTGU	Sumbagut-3	250	2018	Reguler	35 GW
497	Sumut	Swasta	PLTGU	Sumbagut-1 Peaker	250	2018	Reguler	35 GW
498	Sumut	Swasta	PLTM	Huta Padang	10	2019	Reguler	35 GW
499	Sumut	Swasta	PLTM	Batang Toru 4 (PLTM tersebar SUMUT)	10	2022	Reguler	
500	Sumut	Swasta	PLTM	Aek Godang (PLTM tersebar SUMUT)	4	2022	Reguler	
501	Sumut	Swasta	PLTM	Aek Rambe (PLTM tersebar SUMUT)	5,2	2022	Reguler	
502	Sumut	Swasta	PLTM	Sisira (PLTM tersebar SUMUT)	8,2	2022	Reguler	
503	Sumut	Swasta	PLTM	Bingai (PLTM tersebar SUMUT)	7	2022	Reguler	
504	Sumut	Swasta	PLTM	Silinda (PLTM tersebar SUMUT)	6	2022	Reguler	
505	Sumut	Swasta	PLTM	Lae Luhung (PLTM tersebar SUMUT)	10	2022	Reguler	
506	Sumut	Swasta	PLTM	Aek Simadoras (PLTM tersebar SUMUT)	5,1	2022	Reguler	
507	Sumut	Swasta	PLTM	Taniung Lenggang (PLTM tersebar SUMUT)	10	2022	Reguler	
508	Sumut	Swasta	PLTM	Simare (PLTM tersebar SUMUT)	3	2024	Reguler	
509	Sumut	Swasta	PLTM	Pargaringan (PLTM tersebar SUMUT)	8	2024	Reguler	
510	Sumut	Swasta	PLTM	Tanah Pinem (PLTM tersebar SUMUT)	10	2024	Reguler	
511	Sumut	Swasta	PLTM	Poring 1 (PLTM tersebar SUMUT)	9	2024	Reguler	
512	Sumut	Swasta	PLTM	Poring 2 (PLTM tersebar SUMUT)	9	2024	Reguler	
513	Sumut	Swasta	PLTM	Kamangin Nagori (PLTM tersebar SUMUT)	2	2024	Reguler	
514	Sumut	Swasta	PLTM	Aek Tulas (PLTM tersebar SUMUT)	2	2024	Reguler	
515	Sumut	Swasta	PLTM	Anggoci (PLTM tersebar SUMUT)	9	2024	Reguler	
516	Sumut	Swasta	PLTM	Adian Nangka (PLTM tersebar SUMUT)	1,5	2024	Reguler	
517	Sumut	Swasta	PLTS	PT Surya Panca Khatulistiwa (PLTS tersebar SUMUT)	40	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
518	Sumut	Swasta	PLTSa	Sampah Zero Waste (Mining Landfill) (PLTSa tersebar	1	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
519	Sumut	Swasta	PLTSa	Sampah Kota (PLTSa tersebar SUMUT)	1	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
520	Sumut	Swasta	PLTSa	Sampah Kota (PLTSa tersebar SUMUT)	1	2021	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
521	Sumut	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 3 (PLTSa tersebar Sumatera)	10	2023	Reguler	
522	Sumut	Swasta	PLTU	Sumut-2 #1	300	2023	Reguler	
523	Sumut	Swasta	PLTU	Sumut-2 #2	300	2024	Reguler	
524	Sumut	<i>Unallocated</i>	PS	Sumatera Pump Storage-1	500	2025	Reguler	
525	Sumut	<i>Unallocated</i>	PS	Sumatera Pump Storage-1	500	2025	Reguler	
526	Sumut	<i>Unallocated</i>	PLTA	Lau Gunung (PLTA tersebar SUMUT)	7,5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
527	Sumut	<i>Unallocated</i>	PLTA	Lau Gunung (PLTA tersebar SUMUT)	7,5	2020	Reguler	
528	Sumut	<i>Unallocated</i>	PLTA	Mandoge (PLTA tersebar SUMUT)	30	2022	Reguler	
529	Sumut	<i>Unallocated</i>	PLTA	Sibundong-4	75	2023	Reguler	
530	Sumut	<i>Unallocated</i>	PLTA	Cinendang (PLTA tersebar SUMUT)	80	2025	Reguler	
531	Sumut	<i>Unallocated</i>	PLTG	Nias	20	2020	Reguler	
					32.544			

Sumber RUPTL PT PLN 2016-2025

Lampiran II

Daftar Proyek Pembangkit Tenaga Listrik EPC-PT PLN (Status Rencana)

No	PROVINSI	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
1	Aceh	PLTA	Kumbih-3	48	2023	Reguler	
2	Aceh	PLTG	Sinabang-1	6	2018	Reguler	35 GW
3	Bengkulu	PLTA	Ketahun-1	25	2023	Reguler	
4	Bengkulu	PLTG	Muko-muko	25	2017	Reguler	35 GW
5	Bengkulu	PLTP	Hululais (FTP2)	55	2018	Reguler	35 GW
6	Bengkulu	PLTP	Hululais (FTP2)	55	2019	Reguler	35 GW
7	DKI Jakarta	PLTMG	Senayan	100	2017	Reguler	35 GW
8	Gorontalo	PLTS	Gorontalo Tersebar	2	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
9	Jambi	PLTA	Merangin-5 (PLTA tersebar	20,69	2025	Reguler	
10	Jabar	PLTU	Indramayu-4 (FTP2)	1.000	2019	FTP-2	35 GW
11	Jabar	PLTU	Jawa-6 (FTP2)	1.000	2025	FTP-2	
12	Jabar	PLTU	Jawa-6 (FTP2)	1.000	2025	FTP-2	
13	Jateng	PLTMG	Karimunjawa	2	2020	Reguler	
14	Jateng	PLTS	Karimunjawa	1	2021	Reguler	
15	Jatim	PLTMG	Bawean	2	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
16	Jatim	PLTMG	Kangean	2	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
17	Jatim	PLTMG	Sapudi	1	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
18	Jatim	PLTS	Bawean	1	2020	Reguler	
19	Kalbar	PLTM	Melanggar	0,5	2019	Reguler	35 GW
20	Kalbar	PLTM	Mahap	1,3	2019	Reguler	35 GW
21	Kalbar	PLTM	Jitan	3,4	2019	Reguler	35 GW
22	Kalbar	PLTM	Kalis	3	2019	Reguler	35 GW
23	Kalbar	PLTM	Kembayung 1	4,5	2019	Reguler	35 GW
24	Kalbar	PLTM	Kembayung 2	2,5	2019	Reguler	35 GW
25	Kalsel	PLTA	Kusan	65	2025	Reguler	
26	Kalsel	PLTG	Kalsel Peaker 2	100	2021	Reguler	
27	Kalsel	PLTGU	Kalsel Peaker 1	200	2018	Reguler	35 GW
28	Kaltara	PLTMG	Nunukan 3	20	2020	Reguler	
29	Kalteng	PLTG	Bangkanai (FTP2)	70	2017	Reguler	35 GW
30	Kalteng	PLTG	Bangkanai (FTP2)	70	2017	Reguler	35 GW
31	Kaltim	PLTA	Boh	100	2024	Reguler	
32	Kaltim	PLTA	Kelai	55	2025	Reguler	
33	Kaltim	PLTA	Boh	100	2025	Reguler	
34	Kaltim	PLTG	Kaltim Peaker 2	100	2017	Reguler	35 GW
35	Kepri	PLTG	Mobile PP Tanjung Pinang	25	2017	Reguler	35 GW
36	Lampung	PLTG	Lampung Peaker #1	100	2018	Reguler	35 GW
37	Lampung	PLTG	Lampung Peaker #2	100	2018	Reguler	35 GW
38	Maluku	PLTA	Wai Tala	16	2023	Reguler	
39	Maluku	PLTM	Wae Mala	1	2019	Reguler	35 GW
40	Maluku	PLTM	Makariki	2	2019	Reguler	35 GW

No	PROVINSI	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
41	Maluku	PLTM	Isal 3	2	2019	Reguler	35 GW
42	Maluku	PLTM	Nua (Masohi)	4,4	2019	Reguler	35 GW
43	Maluku	PLTM	Nua (Masohi)	4,4	2019	Reguler	35 GW
44	Maluku	PLTM	Wae Mala	1	2020	Reguler	
45	Maluku	PLTM	Makariki	2	2020	Reguler	
46	Maluku	PLTM	Isal 3	2	2020	Reguler	
47	Maluku	PLTMG	Ambon	70	2018	Reguler	35 GW
48	Maluku	PLTMG	Bula	10	2018	Reguler	35 GW
49	Maluku	PLTMG	Wetar	5	2018	Reguler	35 GW
50	Maluku	PLTMG	Namrole	10	2019	Reguler	35 GW
51	Maluku	PLTMG	Seram Peaker	30	2020	Reguler	
52	Maluku	PLTMG	Langgur	20	2020	Reguler	
53	Maluku	PLTMG	Namlea	10	2020	Reguler	
54	Maluku	PLTMG	Saumlaki	10	2020	Reguler	
55	Maluku	PLTMG	Dobo	10	2020	Reguler	
56	Maluku	PLTMG	Saparua	10	2022	Reguler	
57	Maluku	PLTMG	Moa	10	2022	Reguler	
58	Maluku	PLTU	Ambon 2	50	2020	Reguler	
59	Maluku	PLTU	Ambon 2	50	2021	Reguler	
60	Malut	PLTMG	Ternate 2	40	2018	Reguler	35 GW
61	Malut	PLTMG	Bacan	20	2018	Reguler	35 GW
62	Malut	PLTMG	Sanana	15	2018	Reguler	35 GW
63	Malut	PLTMG	Morotai	10	2019	Reguler	35 GW
64	Malut	PLTMG	Tidore	20	2020	Reguler	
65	Malut	PLTMG	Tobelo	20	2020	Reguler	
66	Malut	PLTMG	Maba	10	2023	Reguler	
67	NTB	PLTA	Brang Beh 1	12	2023	Reguler	
68	NTB	PLTA	Brang Beh 2	6	2024	Reguler	
69	NTB	PLTMG	Bima 2	20	2020	Reguler	
70	NTB	PLTP	Sembalun (FTP2)	10	2024	FTP-2	
71	NTB	PLTP	Sembalun (FTP2)	10	2024	FTP-2	
72	NTB	PLTU	Lombok 2	50	2019	Reguler	35 GW
73	NTB	PLTU	Lombok 2	50	2020	Reguler	
74	NTT	PLTA	Wae Rancang I - Manggarai	10	2020	Reguler	
75	NTT	PLTA	Wae Rancang II - Manggarai	6,5	2021	Reguler	
76	NTT	PLTMG	Kupang Peaker	40	2017	Reguler	35 GW
77	NTT	PLTMG	Flores	10	2018	Reguler	35 GW
78	NTT	PLTMG	Waingapu	30	2019	Reguler	35 GW
79	NTT	PLTMG	Rote	5	2019	Reguler	35 GW
80	NTT	PLTMG	Alor	10	2019	Reguler	35 GW

No	PROVINSI	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
81	NTT	PLTMG	Kupang Peaker 2	50	2021	Reguler	
82	NTT	PLTP	Ulumbu 5	20	2019	Reguler	35 GW
83	NTT	PLTP	Mataloko (FTP 2)	20	2019	FTP-2	35 GW
84	NTT	PLTP	Ulumbu 6	20	2024	Reguler	
85	NTT	PLTU	Timor 1	50	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
86	NTT	PLTU	Timor 1	50	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
87	Papua	PLTA	Orya 2	14	2023	Reguler	
88	Papua	PLTM	Amai	0,7	2018	Reguler	35 GW
89	Pabar	PLTM	Waigo	1	2018	Reguler	35 GW
90	Papua	PLTM	Mariarotu I	1,3	2019	Reguler	35 GW
91	Papua	PLTM	Mariarotu II	1,3	2019	Reguler	35 GW
92	Papua	PLTMG	Timika	40	2018	Reguler	35 GW
93	Papua	PLTMG	Merauke	20	2018	Reguler	35 GW
94	Papua	PLTMG	Jayapura Peaker	40	2018	Reguler	35 GW
95	Papua	PLTMG	Serui	10	2019	Reguler	35 GW
96	Papua	PLTMG	Sarmi	5	2019	Reguler	35 GW
97	Papua	PLTMG	Biak	20	2019	Reguler	35 GW
98	Papua	PLTMG	Nabire 2	20	2019	Reguler	35 GW
99	Papua	PLTU	Jayapura 2	50	2020	Reguler	
100	Papua	PLTU	Jayapura 2	50	2021	Reguler	
101	Pabar	PLTA	Warsamson	20	2023	Reguler	
102	Pabar	PLTM	Ransiki	2,4	2019	Reguler	35 GW
103	Pabar	PLTMG	Kaimana	10	2017	Reguler	35 GW
104	Pabar	PLTMG	Sorong	50	2017	Reguler	35 GW
105	Pabar	PLTMG	Raja Ampat	10	2017	Reguler	35 GW
106	Pabar	PLTMG	Bintuni	10	2018	Reguler	35 GW
107	Pabar	PLTMG	Manokwari 2	20	2019	Reguler	35 GW
108	Pabar	PLTMG	Fak-Fak	10	2019	Reguler	35 GW
109	Pabar	PLTU	Sorong	50	2019	Reguler	35 GW
110	Pabar	PLTU	Sorong	50	2019	Reguler	35 GW
111	Sulsel	PLTA	Bakaru 2	70	2021	Reguler	
112	Sulsel	PLTA	Poko	65	2022	Reguler	
113	Sulsel	PLTA	Bakaru 2	70	2022	Reguler	
114	Sulsel	PLTA	Poko	65	2023	Reguler	
115	Sulsel	PLTA	Bakaru 3	146	2023	Reguler	
116	Sulsel	PLTGU	Sulsel Peaker	300	2018	Reguler	35 GW
117	Sulsel	PLTGU	Sulsel Peaker	150	2019	Reguler	35 GW
118	Sulsel	PLTMG	Selayar 2	10	2021	Reguler	
119	Sulsel	PLTU	Sulsel 2	200	2019	Reguler	35 GW
120	Sulsel	PLTU	Sulsel 2	200	2020	Reguler	

No	PROVINSI	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
121	Sulteng	PLTM	Halulai	1,2	2019	Reguler	35 GW
122	Sulteng	PLTMG	Luwuk	40	2017	Reguler	35 GW
123	Sulteng	PLTU	Palu 3	50	2018	Reguler	35 GW
124	Sulteng	PLTU	Palu 3	50	2018	Reguler	35 GW
125	Sulteng	PLTU	Tolitoli	25	2021	Reguler	
126	Sulteng	PLTU	Tolitoli	25	2021	Reguler	
127	Sultra	PLTA	Konawe	21	2024	Reguler	
128	Sultra	PLTA	Watunohu	15	2024	Reguler	
129	Sultra	PLTM	Lapai 1	4	2019	Reguler	35 GW
130	Sultra	PLTM	Riorita	0,5	2019	Reguler	35 GW
131	Sultra	PLTM	Toaha	0,5	2019	Reguler	35 GW
132	Sultra	PLTMG	Wangi-Wangi	5	2020	Reguler	
133	Sultra	PLTMG	Bau-Bau	30	2025	Reguler	
134	Sulut	PLTA	Sawangan	6	2020	Reguler	
135	Sulut	PLTA	Sawangan	6	2020	Reguler	
136	Sulut	PLTG	Minahasa Peaker	150	2018	Reguler	35 GW
137	Sulut	PLTM	Lelipang	0,5	2018	Reguler	35 GW
138	Sulut	PLTMG	Tahuna	10	2020	Reguler	
139	Sulut	PLTP	Kotamobagu I (FTP 2)	20	2025	FTP-2	
140	Sulut	PLTP	Kotamobagu II (FTP 2)	20	2025	FTP-2	
141	Sulut	PLTP	Kotamobagu III (FTP 2)	20	2025	FTP-2	
142	Sulut	PLTP	Kotamobagu IV (FTP 2)	20	2025	FTP-2	
143	Sulut	PLTU	Sulut 1	50	2019	FTP-1	35 GW
144	Sulut	PLTU	Sulut 1	50	2020	FTP-1	
145	Sumbar	PLTA	Masang-3	89	2024	Reguler	
146	Sumut	PLTA	Simonggo-2	90	2023	Reguler	
147	Sumut	PLTA	Ordi-5 (PLTA tersebar SUMUT)	27	2025	Reguler	
148	Papua	PLTM	Digoel	2,6	2019	Reguler	35 GW
				8.020			

Sumber RUPTL PT PLN 2016-2025

Lampiran III

Harga Gas Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Mulut Sumur (*Wellhead*)

(Permen ESDM No. 11/2017)

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT DI MULUT SUMUR (*WELLHEAD*)

- Pemanfaatan gas bumi di mulut sumur (*wellhead*) untuk pembangkit listrik dapat melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum
- Titik interkoneksi tenaga listrik berada ada pada Gardu Induk (GI) terdekat

**Penunjukan
Langsung**



- ✓ Harga gas \leq 8% ICP/MMBTU (*plant gate*)
- ✓ Jaminan alokasi gas sesuai PJBG
- ✓ Nilai investasi pembangkit didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun
- ✓ Efisiensi pembangkit dengan Specific Fuel Consumption (SFC) setara minyak solar (HSD) sebesar 0,25 liter/ kWh

Pelelangan Umum



- ✓ Harga gas > 8% ICP/MMBTU

HARGA GAS

Harga Gas Bumi	Harga LNG
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menteri menetapkan harga gas bumi untuk pembangkit listrik. ➢ Sesuai keekonomian lapangan gas bumi tanpa eskalasi. Jika diperlukan eskalasi, berdasarkan kesepakatan (%). ➢ Jika sudah ada infrastruktur hilir maka harga at <i>plant gate</i>, jika tidak ada maka berlaku harga di hulu. ➢ PLN/badan usaha dapat membeli gas bumi maksimal 11,5% ICP/MMBTU jika pembangkit listrik tidak berada di mulut sumur (<i>wellhead</i>). ➢ Jika harga gas bumi melebihi 11,5% ICP/MMBTU, PLN/badan usaha dapat menggunakan LNG. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sesuai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga <i>Free on Board</i> (FoB). ➢ Apabila harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5% ICP/MMBTU (<i>Parity to Oil</i>) FoB, PLN/badan usaha diberi kewenangan untuk mengimpor LNG sepanjang harganya dibawah 11,5% ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (<i>landed price</i>). ➢ Dalam hal LNG yang akan diimpor harganya di atas 11,5% ICP/MMBTU (<i>landed price</i>), PLN/badan usaha dapat membeli gas pipa dengan harga lebih dari 11,5% ICP/MMBTU atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih tinggi dari 11,5% ICP/MMBTU FoB.

Lampiran IV
 Harga Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit EBT
 (Permen ESDM No. 12/2017)

No.	Jenis Energi Terbarukan	Pelaksanaan Pembelian	Tarif	
			BPP sistem setempat > BPP nasional	BPP sistem setempat ≤ BPP nasional
1.	PLTS Fotovoltaik	Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan		
2.	PLTB	Pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ditawarkan	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
3.	PLTA	Harga Patokan		
		Pemilihan Langsung	Harga ditentukan pada proses pemilihan langsung	
		a. Tenaga Air ≤ 10 MW: <i>Capacity Factor</i> paling sedikit 65% b. Tenaga Air > 10 MW: <i>Capacity Factor</i> tergantung kebutuhan sistem		
4.	PLTP	Harga Patokan	Maximum 100% BPP sistem setempat	Kesepakatan para pihak
5.	PLTBm	Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW)	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
		Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW)		
6.	PLTBg	Harga Patokan (Kapasitas ≤ 10 MW)	Maximum 85% x BPP sistem setempat	100% x BPP setempat
		Pemilihan Langsung (Kapasitas > 10 MW)		
7.	PLTSa	Harga Patokan	Maximum 100% BPP sistem setempat	Kesepakatan para pihak
BPP Pembangkitan sistem setempat dan rata – rata BPP Pembangkitan nasional merupakan BPP Pembangkitan nasional pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PT PLN (Persero).				

Lampiran V
 Harga Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
 (Permen ESDM No. 19/2017)

	Mulut Tambang	Non Mulut Tambang	
Kapasitas	Semua Kapasitas	>100 MW	≤100 MW
Harga Patokan Tertinggi ($BPP_S \leq BPP_N$)	75% BPP_S	BPP_S	BPP_S
Harga Patokan Tertinggi ($BPP_S > BPP_N$)	75% BPP_N	BPP_N	Lelang atau B to B

Lampiran VI

BPP Pembangkitan 2016 per Sub Sistem

(Kepmen ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017)

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM	BPP (Rp. /kWh)	BPP (€USD/kWh)
A	SUMATERA	1.194	8,98
1	SUMATERA BAGIAN UTARA	1.383	10,39
a	SUMUT	1.235	9,28
a.1	Nias	2.049	15,40
b	Aceh	1.383	10,39
b.1	Pulau Weh	1.733	13,02
b.2	Pulau Simeuleu	1.817	13,65
2	SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN SELATAN	1.235	9,28
a	SUMBAR	1.074	8,07
a.1	Kepulauan Mentawai	2.096	15,75
b	RIAU & KEP RIAU	1.349	10,14
b.1	Bintan	1.583	11,90
b.2	Tanjung Balai Karimun	1.706	12,82
b.3	Natuna	2.089	15,70
b.4	Anambas	2.149	16,15
c	S2JB (SUMSEL, JAMBI, BENGKULU)	1.046	7,86
c.1	Pulau Enggano	2.322	17,45
d	LAMPUNG	1.034	7,77
3	BANGKA	1.817	13,66
4	BELITUNG	1.619	12,17
5	SUB SISTEM KEPULAUAN KECIL LAINNYA	2.096	15,75

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM	BPP (Rp. /kWh)	BPP (€USD/kWh)
B	JAWA BALI	868	6,52
1	DKI	867	6,51
a	Kepulauan Seribu (Non Koneksi Kabel Laut Jawa Bali)	2.332	17,52
2	BANTEN	866	6,51
a	Pulau Panjang	2.332	17,52
3	JABAR	866	6,51
4	JATENG	868	6,52
a	Karimun Jawa	2.332	17,52
5	JATIM	870	6,54
a	Madura Isolated	2.332	17,52
b	Bawean	1.964	14,76
c	Gili Ketapang	2.332	17,52
6	BALI	881	6,62
a	Sistem 3 Nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan)	1.745	13,11
7	SUB SISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52
C	KALIMANTAN	1.373	10,31
1	KALBAR	1.655	12,43
2	KALSELTENG	1.203	9,04
3	KALTIMRA	1.357	10,20
4	SUB SISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52

Lampiran VI (lanjutan)
BPP Pembangkitan 2016 per Sub Sistem
(Kepmen ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017)

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM	BPP (Rp./kWh)	BPP (€USD/kWh)	NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM	BPP (Rp./kWh)	BPP (€USD/kWh)
D	SULAWESI & NUSA TENGGARA	1.421	10,68	E	MALUKU & PAPUA	2.008	15,09
1	SULUTTENGGGO	1.696	12,74	1	MALUKU & MALUKU UTARA	2.305	17,32
	a Sulawesi Bagian Utara (Manado, Gorontalo, Kotamobagu)	1.669	12,54	a	Ambon	1.680	12,62
	b Toli - Toli	2.026	15,22	b	Seram	2.330	17,51
	c Tahuna	2.332	17,52	c	Saparua	1.626	12,22
	d Palu	1.016	7,63	d	Buru	1.728	12,98
	e Luwuk	1.759	13,22	e	Ternate - Tidore	1.971	14,81
2	SULSELBAR	1.078	8,10	f	Sanana	1.811	13,61
	a Sulawesi Bagian Selatan (Makassar, Mamuju, Palopo, Pinrang, Watampone, Pare-Pare)	1.016	7,63	g	Bacan	1.811	13,61
	b Kendari	1.801	13,53	h	Halmahera (Tobelo, Malifut, Jailolo, Sofifi, Maba)	1.685	12,67
	c Bau - Bau	2.137	16,06	i	Daruba	1.587	11,93
	d Selayar	2.114	15,88	j	Tual	1.657	12,45
3	NTB	1.821	13,68	k	Dobo	2.063	15,50
	a Bima	1.880	14,12	l	Saumlaki	1.686	12,67
	b Lombok	1.629	12,24	2	PAPUA & PAPUA BARAT	1.802	13,54
	c Sumbawa	1.978	14,87	a	Jayapura	1.959	14,72
4	NTT	2.332	17,52	b	Sarmi	2.332	17,52
	a Sumba	1.887	14,18	c	Biak	1.753	13,17
	b Timor	2.226	16,73	d	Serui	1.778	13,36
	c Flores Bagian Barat	1.751	13,16	e	Nabire	1.604	12,06
	d Flores Bagian Timur	2.070	15,55	f	Wamena	2.332	17,52
5	SUB SISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52	g	Timika	1.786	13,42
				h	Merauke	1.704	12,80
				i	Tanah Merah	1.704	12,80
				j	Manokwari	1.760	13,23
				k	Sorong	1.305	9,81
				l	Teminabuan	2.332	17,52
				m	Fak Fak	2.332	17,52
				n	Kaimana	2.332	17,52
				o	Bintuni	2.332	17,52
				p	Raja Ampat	2.332	17,52
				3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA	2.332	17,52
					RATA - RATA	983	7,39